**BAB I**

**PENDAHULUAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * 1. **Latar Belakang.**   Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-III (RPJMD III) 2016-2021. Dokumen perencanaan ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. |

Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan juga sedang mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Baik RPJMD III maupun RENSTRA disusun ditengah-tengah pertumbuhan perekonomian yang sangat dinamis bukan saja oleh karena kondisi perekonomian global yang fluktuatif akibat berbagai krisis, akan tetapi juga karena perekonomian nasional yang relatif stabil namun tetap masih rentan terhadap pengaruh global. RENSTRA adalah dokumen strategis SKPD untuk menjalankan program-program RPJMD di sektornya masing-masing.

Mewujudkan Sumatera Barat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Sumatera Barat. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Pada kenyataannya kemajuan perekonomian ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sudah sangat serius di hampir semua lini : jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Hal ini menyebabkan daya dukung infrastruktur Indonesia dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkurang serta sangat tidak efisien, dan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional.

Era pemerintahan baru 2016-2021 dengan RPJMD III dan RENSTRA III dipandang sangat strategis sekaligus sangat kritis. Strategis dalam pengertian inilah era dimana infrastruktur, transportasi, dan sistem pelayanan publik yang profesional harus dibangun secara radikal untuk menutupi defisit dan kesenjangan yang sudah berakumulasi selama bertahun-tahun. Ini adalah pemerintahan dengan masa tugas 5 atau 10 tahun kedepan yang mengemban tugas untuk membangun transportasi sesuai dengan amanat Undang-Undang rencana pembangunan jangka panjang. Sementara kritis dalam pengertian bahwa kegagalan untuk membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak negatif yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian, daya saing, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi antara lain, merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lma) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra memuat strategi pembangunan transportasi, kebijakan umum, program, kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).

Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan transportasi. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaanpembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Renstra 2016-2021 akan berisi beberapa kebijakan sektor Perhubungan, yaitu melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral. Proyek strategis yang sudah ada sebelumnya mulai dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang dan akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Beberapa rencana pengembangan sektor transportasi antara lain adalah pengembangan pelabuhan, rencana pengembangan jalur kereta api, pengembangan bandara termasuk bandara perintis, angkutan penyeberangan serta pengembangan transportasi perkotaan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Restra ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

* 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
  17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Perhubungan;
  18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-904-2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015
  19. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan dan pedoman kebijakan, dan strategi pembangunan di bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan pada khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 pada umumnya.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah tercapainya kondisi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Perhubungan yang holistik, antisipatik dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dari sektor Perhubungan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Renstra SKPD.

* 1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

* 1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

* 1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

* 1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki SKPD, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu untuk diatasi melalui Renstra SKPD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum pembentukan SKPD, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas sumber daya SKPD, mencakup SDM, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan.

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD dan faktor yang mempengaruhinya.

* 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Derah

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah Terpilih.

* 1. Telaahan Renstra K/L

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

* 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

* 1. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan di dalam tujuan dan sasaran.

4.1 Visi dan Misi

Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, apa yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam 5 tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN  DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun medatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan khususnya di bidang transportasi.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

**KEPALA DINAS**

**SEKRETARIAT**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Subbag Program dan Keuangan

Subbag Umum dan Kepegawaian

da

Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian

Bidang Laut dan Udara

Bidang Keselamatan Angkutan Darat

Seksi Angkutan

Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan

Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran

Seksi Lalu Lintas

Seksi Pengendalian Operasional

Seksi Kepelabuhan

Seksi Perkeretaapian

Seksi Bimbingan Keselamatan

Seksi Keudaraan

UPTD Terminal Tipe B Wilayah I

UPTD Terminal Tipe B Wilayah I

Subbag TU

Subbag TU

Seksi Pengawasan Operasional

Seksi Pengawasan Operasional

Seksi Penyelenggaraan Terminal

Terminal

Seksi Penyelenggaraan Terminal

Jabatan Fungsional Koordinator Terminal

Jabatan Fungsional Koordinator Terminal

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. **Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

1. **Fungsi**
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
4. Pembinaan dan fasilitasi di bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
6. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian, Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   * + 1. **Kepala Dinas**
          1. Menyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
          2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
          3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;
          4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perhubungan;
          5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program, Kesekretariatan, Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian, Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara;
          6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
          7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan lalu lintas angkutan darat dan perkeretaapian, teknik dan sarana dan keselamatan angkutan darat, perhubungan laut, perhubungan udara;
          8. Menyelenggarkan koordinasi kegiatan teknis Perhubungan;
          9. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
          10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
          11. Menyelenggarakan tugas lain sesuai gengan tugas pokok dan fungsinya

Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat;
2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian;
3. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat;
4. Bidang Perhubungan Laut;
5. Bidang Perhubungan Udara
6. UPTD;
7. Kelompok jabatan Fungsional.
   * + 1. **Sekretariat**

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, Ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawain, dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas.

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program dan keuangan meliputi :koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, di lingkungan Dinas.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

* + - 1. **BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian.

Bidang membawahi:

1. Seksi Angkutan.

Mempunyai tugas Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program angkutan, Pelakasanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi angkutan.

1. Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan sesuai urusan dan ruang lingkup lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

1. Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan urusan dan ruang lingkup perkeretaapian.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Pekeretaapian.

**4. BIDANG KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT**

Bidang Keselamatan Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknik sarana dan penanggulangan kecelakaan, pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan.

Bidang Keselamatan Angkutan Darat dibantu oleh:

1. Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan meliputi : Pemberian arahan dan bantuan teknis kepada Kabupaten / Kota, pengguna dan penyedia jasa, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi ; penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Provinsi; pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi.

1. Seksi Pengendalian Operasional.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakana teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengendalian Operasional, meliputi : Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi, pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan, pemeriksaan angkutan penumpang umum di Terminal tipe B, pelaksanaan penyidikan pelanggaran Undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan, Perda provinsi Bidang LLAJSDP, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor, pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi, pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau, pengawasan pengoperasian angkutan penyeberangan antar Kabupaten / Kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi dan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

1. Seksi Bimbingan Keselamatan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bimbingan Keselamatan, meliputi: pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, penilaian/pemberian reward dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa.

**5. BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA**

Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perhubungan Laut dan Udara.

Bidang Perhubungan Laut dibantu oleh:

1. Seksi Agkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.

1. Seksi Kepelabuhan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Kepelabuhanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kepelabuhanan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Kepelabuhanan.

1. Seksi Keudaraan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Keudaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Keudaraan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Keudaraan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

1. **UPTD Terminal**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan terminal tipe B.

**Kepala UPTD :**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pengelolaan Terminal Tipe B memiliki fungsi :

* Menyusun program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang angkutan jalan.
* Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketatausahaan;
* Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan terminal
* Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan terminal;
* Melaksanakan evaaluasi kinerja pelayanan terminal penumpang angkutan jalan

Kepala UPTD membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas :

Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang ketatusahaan UPTD pengelolaan terminal tipe B;

Pengusulan dan penetapan operator operasional, operator sistem tiket dan satuan tugas pengamanan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana UPTD pengelolaan terminal tipe B;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang operasional UPTD pengelolaan terminal tipe B.

1. Seksi Penyelenggaraan Terminal

Tugas Seksi Penyelenggaraan Terminal yakni : Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang :

pengumpulan dan pengolahan data operasional terminal;

melakukan pengaturan operasional terminal;

menyiapkan bahan-bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan terminal;

menyiapkan bahan-bahan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terminal;

pemantauan kegiatan operasional terminal;

pelaksanaan manajemen lalu lintas kawasan/daerah wilayah kerja terminal penumpang tipe B;

Program, rencana kegiatan, standar prosedur operasional dan standar pelayanan minimal terminal;

Pemantauan dan penilaian kesepakatan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga

1. Seksi Pengawasan Operasional Terminal

Tugas Seksi Pengawasan Terminal yakni: Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang di bidang :

Menyiapkan bahan-bahan pengawasan operasional terminal;

Menyiapkan bahan-bahan kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang umum;

Melakukan pengawasan operasional terminal

fasilitasi perbantuan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

fasilitasi pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan umum;

pelaksanaan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang.

1. Pimpinan Kelompok Fungsional
   1. **Sumber Daya Dinas Perhubungan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan didukung dengan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Asset serta 1 UPTD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Berikut data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan berdasarkan golongan ;

**Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan (kondisi Maret 2016)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **POSISI AWAL 2016** | **JUMLAH** |
| 1 | Golongan IV | 18 |
| 2 | Golongan III | 163 |
| 3 | Golongan II | 51 |
| 4 | Golongan I | 6 |
| **TOTAL** | | **238** |

Dan berikut merupakan data jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang ada pada Dinas Perhubungan

**Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **BERDASARKAN JABATAN** | **JUMLAH** |
| 1 | ESELON II | 1 |
| 2 | ESELON III | 7 |
| 3 | ESELON IV | 19 |
| 4 | STAF/FUNGSIONAL | 211 |
| **TOTAL** | | **238** |

Di bawah ini adalah data jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

**Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PENDIDIKAN** | **JUMLAH** |
| 1 | S3 | - |
| 2 | S2 | 19 |
| 3 | S1/D4 | 55 |
| 4 | D3 | 8 |
| 5 | D2/D1/SLTA | 136 |
| 6 | SLTP/SD | 20 |
| **TOTAL** | | **238** |

Dan berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan bidang yang ada di Dinas Perhubungan

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **SEKRETARIAT/BIDANG** | **JUMLAH** |
| 1 | Sekretariat | 39 |
| 2 | Bidang LLAD dan Perkeretaapian | 16 |
| 3 | Bidang TSKAD | 22 |
| 4 | Bidang Laut | 7 |
| 5 | Bidang Udara | 11 |
| 6 | Bidang Kominfo | 12 |
| 7 | UPTD PENIMBANGAN | 131 |
| **TOTAL** | | **238** |

Untuk mendukung pelaksanan kerja dan pelayanan, Dinas Perhubungan memiliki asset antara lain :

1. Asset berupa Tanah, seperti pada tabel berikut

Tabel 2.5 Data Asset berupa Tanah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS/NAMA BARANG** | **KODE BARANG** | **LUAS TANAH (M2)** | **TAHUN** | **OBYEK/UNIT KERJA** |
| Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II | 01.01.11.01.02 | 897,00 | 1998 | RUMAH DINAS |
| Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama | 01.01.11.01.05 | 1.500,00 | 1990 | MESS/KIP |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 2.400,00 | 1979 | JTO (JEMBATAN TIMBANG OTO) PASAMAN TIMUR |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 4.535,00 | 1987 | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 2.400,00 | 1979 | UPTD JTO LINTAU |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 2.400,00 | 1980 | UPTD JTO KUBU KERAMBIL |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 2.400,00 | 1979 | UPTD JTO SEI LANGSAT |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 15.628,00 | 2007 | UPTD JTO (UPPKB AIR HAJI) |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 5.010,00 | 2003 | UPTD JTO KAMANG BARU |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 2.400,00 | 1982 | UPTD JTO LUBUK BUAYA |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 7.000,00 | 1995 | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 8.900,00 | 2006 | UPTD JTO TANJUNG BALIK |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 1.001,00 | 2005 | KANTOR KARANTINA KETAPING |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 900,00 | 1987 | KANTOR EX.CABDIN SIJUNJUNG |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 4.000,00 | 1982 | UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR GADUT |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 2.300,00 | 1974 | EX,KANTOR JEMBATAN TIMBANG OTO PD.HIJAU |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.11.04.01 | 5.000,00 | 1980 | UPTD JTO LUBUK LASIH |
| Tanah Kosong Yang Tidak Diusahakan | 01.01.11.05.01 | 1.600,00 | 1991 | TANAH KOSONG DINAS KOMINFO BUKITTINGGI |
| Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori | 01.01.13.07.07 | 46.176,00 | 2012 | TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2012 |
| Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori | 01.01.13.07.07 | 14.716,00 | 2013 | TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2013 |
| Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori | 01.01.13.07.07 | 3.958,00 | 2014 | TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2014 |
| Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori | 01.01.13.07.07 | 24.877,00 | 2015 | TANAH UNTUK JALAN KA DUKU-BIM TH 2015 |

1. Asset berupa peralatan dan mesin, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Data Asset berupa Peralatan dan Mesin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Barang** | **Jumlah** | **Harga** |
| 1 | Alat-alat besar | 8 | 40.595.500,- |
| 2 | Alat-alat angkutan | 23 | 3.857.415.000,- |
| 3 | Alat bengkel dan alat ukur | 30 | 1.882.955.313,- |
| 4 | Alat kantor dan rumah tangga | 1.524 | 2.993.714.600,- |
| 5 | Alat studio dan alat komunikasi | 6 | 486.049.002,- |
| 6 | Alat-alat kedokteran | 5 | 7.854.000,- |
| 7 | Alat laboratorium | 12 | 204.694.984,- |
| 8 | Alat-alat persenjataan/keamanan | 41 | 606.890.000,- |
| **Jumlah** | | | 10.080.168.399,- |

1. Asset berupa bangunan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Data Asset berupa Bangunan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Bangunan** | **Nama Obyek** | **Luas Lantai (M2)** | **Harga** | **Tahun** |
| Gedung Kantor | UPTD JTO LUBUK LASIH | 137,50 | 81.300.000 | 2003 |
| Bangunan Kantor | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 432,00 | 82.100.000 | 1978 |
| Gedung Kantor | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 64,00 | 8.900.000 | 1978 |
| Gedung Kantor | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 126,00 | 18.700.000 | 1978 |
| Gedung kantor | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 54,00 | 23.600.000 | 2000 |
| Gedung Kantor Pusat | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 2.514,00 | 1.584.800.000 | 1997 |
| Gedung Kantor | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 72,00 | 398.897.900 | 2005 |
| Gedung Kantor | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 60,00 | 25.300.000 | 1995 |
| Gedung Kantor | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 770,00 | 732.543.000 | 1983 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO LUBUK BUAYA | 156,50 | 67.310.000 | 1980 |
| Bangunan Kantor KIP | MESS/KIP | 217,00 | 72.800.000 | 1990 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO KAMANG BARU | 193,00 | 115.700.000 | 2003 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO KUBU KERAMBIL | 201,00 | 20.600.000 | 1980 |
| Ex Cabdin DLLAJ Sijunjung | KANTOR EX.CABDIN SIJUNJUNG | 145,50 | 38.500.000 | 1987 |
| Ex UPTD Penimbangan Kend | KANTOR DINAS KOMINFO ANTOKAN | 353,00 | 348.230.000 | 2003 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO TANJUNG BALIK | 0,00 | 2.689.770.842 | 2006 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO (UPPKB AIR HAJI) | 0,00 | 2.679.270.000 | 2007 |
| Gedung Kantor | JTO (JEMBATAN TIMBANG OTO) PASAMAN TIMUR | 226,50 | 20.552.000 | 1972 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO LINTAU | 128,00 | 10.600.000 | 1979 |
| Gudang | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 98,00 | 17.200.000 | 1978 |
| Gudang ATK | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 64,00 | 29.500.000 | 1995 |
| Gedung Kantor | UPTD JTO SEI LANGSAT | 267,00 | 160.000.000 | 2003 |
| Mushalla | UPTD JTO KAMANG BARU | 4,00 | 2.300.000 | 2003 |
| Mushalla | UPTD JTO SEI LANGSAT | 4,00 | 2.300.000 | 2003 |
| Mushalla | UPTD JTO LUBUK LASIH | 4,00 | 2.300.000 | 2003 |
| Gedung Koperasi | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 62,00 | 36.900.000 | 1995 |
| Pos Jaga | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 4,00 | 3.600.000 | 1995 |
| Garase | KANTOR DISHUB KOMINFO R.SALEH | 120,00 | 44.500.000 | 1995 |
| Garase Mobil Derek | KANTOR DISHUB KOMIMFO KUINI | 96,00 | 47.925.000 | 2014 |
| Rumah Dinas | RUMAH DINAS | 293,00 | 478.733.550 | 2007 |
| Mess | UPTD JTO LUBUK LASIH | 125,00 | 70.800.000 | 2003 |

1. Asset tetap lainnya, yaitu peralatan musik dari Korps Musik Dinas Perhubungan dan buku-buku Perundang-undangan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Data Asset berupa Asset Tetap lainnya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Barang** | **Jumlah** | **Harga** | **Total** | **Tahun** |
| Set Dram | 9,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 2006 |
| Set Dram | 4,00 | 187.500,00 | 750.000,00 | 2006 |
| Set Dram | 5,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 2006 |
| Set Dram | 4,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 2006 |
| Tenor Dram | 3,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 2006 |
| Tenor Dram | 1,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2006 |
| Maching Trio/Remo | 1,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 1984 |
| Maching Trio/Remo | 1,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1984 |
| Tambur | 1,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 2006 |
| Tambur | 1,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2006 |
| Tambur | 4,00 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 2006 |
| Tympani | 1,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1984 |
| Bellyra | 2,00 | 410.000,00 | 820.000,00 | 1984 |
| Symbel | 1,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 1995 |
| Standar set dram | 3,00 | 33.333,33 | 100.000,00 | 2006 |
| Standar Not | 3,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 2006 |
| Standar Tambur | 4,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 2006 |
| Terompet cornet | 4,00 | 212.500,00 | 850.000,00 | 2006 |
| Terompet cornet | 2,00 | 414.250,00 | 828.500,00 | 2006 |
| Slide trombone | 2,00 | 337.500,00 | 675.000,00 | 2006 |
| Slide trombone | 2,00 | 5.809.500,00 | 11.619.000,00 | 1995 |
| Value Trombone | 1,00 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1984 |
| Value Trombone | 1,00 | 7.681.500,00 | 7.681.500,00 | 1995 |
| Tenor Saxopone | 1,00 | 975.000,00 | 975.000,00 | 1995 |
| Tenor Saxopone | 1,00 | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 2006 |
| Clarinet | 2,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 1995 |
| Bas cobra | 2,00 | 1.350.000,00 | 2.700.000,00 | 1984 |
| Bariton Saxophone | 1,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 2006 |
| French Horn | 1,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1984 |
| Bariton Horn | 3,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2006 |
| Bas Horn | 2,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2006 |
| Bas Horn | 2,00 | 1.350.000,00 | 2.700.000,00 | 2006 |
| Stella | 1,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 2006 |
| Dram | 3,00 | 1.870.000,00 | 5.610.000,00 | 2011 |
| Tenor Dram | 2,00 | 2.420.000,00 | 4.840.000,00 | 2011 |
| Trombone Klep | 1,00 | 6.820.000,00 | 6.820.000,00 | 2011 |
| Trompet | 1,00 | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 2011 |
| Sopran | 1,00 | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 2011 |
| Buku Per UU an | 18,00 | 272.222,22 | 4.900.000,00 | 2009 |
| Trompet | 2,00 | 7.000.000,00 | 5.600.000,00 | 2013 |
| Movies Tenor Saxophone | 1,00 | 2.000.000,00 | 800.000,00 | 2013 |
| Movies Alto Saxophone | 2,00 | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | 2013 |
| Tenor Horn | 1,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2013 |
| Simble 16" | 2,00 | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2013 |
| Clarinet | 2,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2013 |
| Kulit tambur 28" | 2,00 | 900.000,00 | 720.000,00 | 2013 |
| Kulit Tenor | 3,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | 2013 |
| Kulit Drum | 6,00 | 400.000,00 | 960.000,00 | 2013 |
| Clarinet | 1,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 2014 |
| Terompet | 1,00 | 3.829.500,00 | 0,00 | 2004 |
| Trombone | 1,00 | 3.937.500,00 | 0,00 | 2004 |
| Trombone | 1,00 | 7.681.500,00 | 0,00 | 2004 |
| Bass Dram | 1,00 | 5.932.000,00 | 0,00 | 2004 |
| Bellira | 1,00 | 4.828.000,00 | 0,00 | 2004 |
| Ciembele | 1,00 | 2.138.000,00 | 0,00 | 2004 |
| Clarinet | 1,00 | 3.370.000,00 | 0,00 | 2004 |
| Movies | 1,00 | 1.593.000,00 | 0,00 | 2004 |
| Rit | 3,00 | 540.000,00 | 0,00 | 2004 |
| Saxophone | 1,00 | 10.440.000,00 | 0,00 | 2004 |

* 1. **Kinerja Pelayanan.**

**A. Pelayanan Sub Sektor Darat.**

Pembangunan Sub Sektor Transportasi Darat meliputi :

1. Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Pengadaan fasilitas lalu lintas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi pengguna jalan dalam rangka keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan.

Kondisi topografis Sumatera Barat memiliki kondisi banyak tanjakan/turunan tajam dan berada di pinggir bukit yang curam. Panjang jalan nasional dan provinsi mencapai 2.400 km lebih. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 2 Juta unit lebih (termasuk sepeda motor)

Untuk pengembangan sarana dan prasarana keselamatan LLAJ, pada tahun 2011 - 2015 khusus pada jalan Provinsi dan jalan Negara telah dilakukan pengadaan dan pemasangan :

**Tabel 2.9 Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas                     tahun 2011-2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sarana Prasarana Keselamatan** | **Target** | **Realisasi** |
| 1 | Rambu | 2.810 | 2.631 |
| 2 | Guardrail | 3.752 | 3.830 |
| 3 | Delineator | 3.300 | 2.678 |
| 4 | Marka | 14.425 | 16.079 |
| 5 | Traffic Light | 8 | 3 |
| 6 | Cermin Tikungan | 20 | 33 |
| 7 | RPPJ | 24 | 36 |
| 8 | Warning Light | 15 | 21 |

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas baik itu kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan pengemudi kendaraan angkutan umum rutin dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas sesuai aturan yang ditetapkan. Dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, berikut data kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 2.10 Jumlah kecelakaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun                      2010 - 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TAHUN** | **JUMLAH KEJADIAN** | **KORBAN** | | |
| **LUKA BERAT** | **LUKA RINGAN** | **MENINGGAL DUNIA** |
| 1 | 2011 | 2.504 | 1.254 | 2.515 | 765 |
| 2 | 2012 | 3.198 | 1.638 | 3.554 | 685 |
| 3 | 2013 | 2.625 | 1.247 | 3.298 | 611 |
| 4 | 2014 | 2.336 | 1.103 | 3.022 | 530 |
| 5 | 2015 | 2.604 | 1.117 | 3.317 | 563 |

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan angka kecelakaan, namun pada tahun 2013 dan 2014 angka kecelakaan telah menurun, karena itu Dinas Perhubungan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan keselamatan lalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Masalah keselamatan lalu lintas merupakan tugas utama Dinas Perhubungan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor, tingkat kerawanan kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor juga meningkat. Untuk itu setiap kendaraan bermotor dilakukan uji berkala pertama sebagai awal pengecekan kondisi laik jalan kendaraan, berikut data pengujian berkala pertama pada tahun 2010 – 2015

**Tabel 2.11 Jumlah Kendaraan yang Telah Dilakukan Uji Berkala                       Pertama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR** | **TOTAL** |
| 1 | Tahun 2011 | 7.893 |
| 2 | Tahun 2012 | 7.981 |
| 3 | Tahun 2013 | 7.375 |
| 4 | Tahun 2014 | 7.445 |
| 5 | Tahun 2015 | 5.649 |

1. Pembangunan dibidang sarana dan prasarana perkeretaapian.

Angkutan Kereta Api merupakan alternatif moda transportasi yang memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan mobilitas orang dan barang dengan biaya lebih murah dan efesien. Angkutan Kereta Api juga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi resiko cepatnya kerusakan jalan akibat muatan lebih.

Lintasan Kereta Api Sumatera Barat yang masih aktif saat ini adalah Padang-Sawahlunto, Padang-Pariaman dan Indarung-Teluk Bayur. Dengan terhentinya produksi batubara di Sawahlunto, angkutan barang dengan Kereta Api padang-Sawahlunto terhenti sejak 2003. Namun lintasan ini saat ini dimanfaatkan untuk angkutan wisata dari Padang Panjang-Sawahluno. Sedangkan lintasan Padang-Pariaman dimanfaatkan untuk angkutan reguler dan angkutan wisata.

Untuk peningkatan dan pengembangan kereta api di Sumatera Barat, seluruhnya mengandalkan pendanaan dari APBN. Realisasi anggaran APBN yang dialokasikan pada tahun 2008 sebesar 30 Miliar, tahun 2009 sebesar 34 Miliar dan telah disetujui pada Satuan 3 APBN tahun 2010 sebesar 50 Miliar. Jadi setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Disamping peningkatan jalur kereta api yang sudah ada, direncanakan pembangunan jalur kereta api baru yaitu : ***short cut Padang-Solok*** yang merupakan jalur strategis guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas Padang – Solok yang kian hari makin meningkat kepadatan jalannya. Untuk perencanaan pembangunan jalur ini Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena jalur yang akan dibuat melalui kawasan hutan lindung. Untuk jalur ***kereta api Duku-Bandara Internasional Minangkabau*** pada awal perencanaan akan diaktifkan pada bulan Agustus 2016, namun setelah dilakukan uji coba ada sedikit kendala maka akan dimundurkan pada bulan Januari 2017.

Untuk mendukung aksesibilitas Bandara Internasional Minangkabau, direncanakan pembangunan Jalan Kereta Api Bandara, dengan panjang rel ± 4,2 km dari jalan kereta api eksisting (Duku – Bandara)

Tahapan yang telah dilaksanakan :

* Studi Kelayakan Tahun 2006
* Penyusunan AMDAL Tahun 2010
* Penyusunan DED Tahun 2010
* Pembebasan Lahan Kereta Api Bandara (DUKU – BIM ) Tahun 2010

Untuk Short Cut Padang-Solok tahapan yang telah dilaksanakan adalah Pra Study tahun 2008, Study Kelayakan dan Penentuan Trase tahun 2009 dan Penyusunan DED pada tahun 2010, yang seluruhnya dengan dana APBN, untuk Fisik diusulkan melalui dana APBN Kementerian Perhubungan untuk tahun 2015.

1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Untuk kelancaran angkutan penyeberangan, telah dibangun pelabuhan penyeberangan permanen pada 3 (tiga) lokasi yaitu Siberut, Tua Pejat dan Sikakap. Pelabuhan Penyeberangan Siberut dan Tua Telah mulai dioperasikan sejak awal 2010.

Sedangkan pada tahun 2015 melalui APBN dilakukan pembangunan tahap II dermaga Ombilin, Danau Singkarak dan pembangunan dermaga di Tanjung Sani, danau Maninjau.

Untuk Kapal penyeberangan sampai dengan tahun 2015 telah beroperasi 2 unit kapal di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Tabel 2.12 Kapal dan Lintasan Penyeberangan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA KAPAL** | **LINTASAN PENYEBERANGAN** | **FUNGSI** |
| 1 | KMP AMBU-AMBU | Padang - Sikakap  Padang - Tua Pejat | Angkutan Penumpang & Kendaraan |
| 2 | KMP GAMBOLO | Padang – Siberut – Sikabaluan  Padang – Tua Pejat | Angkutan Penumpang & Kendaraan |

1. **Pelayanan Sub Sektor Laut.**

Sektor laut saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah pusat dalam hal peningkatan infrastruktur serta sarana dan prasarananya untuk mewujudkan negara Bahari yang kuat.

Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan Utama yang merupakan satu – satunya pelabuhan laut teramai dan terbesar di pantai barat pulau Sumatera didirikan pada tahun 1893 dengan nama ” EMMA HAVEN ”. Oleh sebab itu Pelabuhan Teluk Bayur mempunyai peranan yang sangat strategis tidak saja merupakan pintu gerbang angkutan laut bagi orang, barang dan jasa bagi daerah Sumatera Barat tetapi juga daerah – daerah di sekitarnya seperti Sumatera Utara bagian selatan, Aceh, Riau, Jambi dan Bengkulu. Disamping itu juga berorientasi kepada negara – negara di kawasan Timur Indonesia seperti (Asia Selatan, Asia Barat, Afrika dan Saudi Arabia).

Untuk memenuhi tuntutan dari perkembangan Pelabuhan Teluk Bayur yang terus berkembang maka diadakan upaya – upaya untuk mengoptimalisasikan pelayanan terutama peningkatan fasilitas (sarana dan prasarana) pelabuhan yang ada. Upaya tersebut telah dilakukan melalui Study Rencana Induk / Master Plan Pelabuhan Teluk Bayur yang dibuat pada tahun 1983 dan dikaji ulang pada tahun 1996, tahun 2004 serta terakhir pada tahun 2015. Proyeksi pengembangan pelabuhan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2030 yaitu Jangka Pendek (s/d tahun 2010), Jangka Menengah (s/d Tahun 2020) dan Jangka Panjang (s/d tahun 2030). Study ini bertujuan untuk mendapat kerangka acuan dasar di dalam rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan Teluk Bayur sehingga dapat diwujudkan pemanfaatan areal pelabuhan yang berkualitas, serasi dan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan daya dukung lingkungan .

Pelabuhan Teluk Bayur berjarak ± 7 km dari pusat Kota Padang mempunyai areal pelabuhan seluas 434,47 Ha terdiri dari luas daratan 428 Ha dan luas lautan 6,47 Ha, jika dilihat dari sudut pengapalan barang export seperti semen, batu bara dan CPO pengapalan melalui pelabuhan Teluk Bayur setiap tahun terlihat peningkatan, maka pelabuhan tersebut telah wajib untuk dikembangkan.

Kepulauan Mentawai yang saat ini terus berbenah juga membutuhkan beberapa pembangunan fisik dermaga guna menunjang trasportasi didaerah tersebut, dimana saat ini dokumen perencanaan telah disediakan baik itu dari APBD Provinsi di Sumatera Barat, APBD Kab. Kepulauan Mentawai maupun dari dana APBN Kementerian Perhubungan, dan diperlukan sarana trasnportasi yang cukup karena masih banyaknya terdapat daerah teroslir dan terpencil di Kab. Kepulauan Mentawai.

Untuk menunjang transportasi laut dibeberapa daerah, telah dibangun beberapa pelabuhan yang umumnya ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.13 Pelabuhan yang sudah Ada Dermaga di Provinsi Sumatera                      Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA PELABUHAN** | **LUAS DERMAGA** | **LOKASI** |
| 1 | Pelabuhan Teluk Bayur | 30.460 m² | Kota Padang |
| 2  3 | Pelabuhan Muara Padang  Pelabuhan Sikakap | 1.096 m²  1.024 m² | Kota Padang  Kab. Kep. Mentawai |
| 4 | Pelabuhan Siuban | 560 m² | Kab. Kep. Mentawai |
| 5 | Pelabuhan Tua Pejat | 548 m² | Kab. Kep. Mentawai |
| 6 | Pelabuhan Muara Siberut | 416 m² | Kab. Kep. Mentawai |
| 7 | Pelabuhan Pokai | 816 m² | Kab. Kep. Mentawai |
| 8 | Pelabuhan Pasapuat | 560 m² | Kab. Kep. Mentawai |
| 9 | Pelabuhan Carocok Painan | 816 m² | Kab. Pesisir Selatan |
| 10 | Pelabuhan Teluk Tapang | 1.440 m² | Kab. Pasaman Barat |
| 11 | Pelabuhan Air Bangis | 330 m² | Kab. Pasaman Barat |

Sedangkan untuk perencanaan pembangunan pelabuhan juga telah disiapkan dokumen perencanaan diantaranya :

1. Dokumen Perencanaan Pelabuhan Labuhan Bajau Kab. Kepulauan Mentawai

Tabel 2.14 Tahapan Perencanaan Pelabuhan Labuhan Bajau

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | TAHUN | DANA |
| 1 | Pra Studi Kelayakan | 2010 | APBD Sumbar |
| 2 | Studi Kelayakan | 2011 | APBD Sumbar |
| 3 | Rencana Induk Pelabuhan | 2012 | APBD Sumbar |
| 4 | Detail Engineering Design | 2013 | APBD Sumbar |
| 5 | DLKr & DLKp Pelabuhan | 2013 | APBD Sumbar |
| 6 | Dok. Lingkungan UKL-UPL | 2015 | APBD Sumbar |

1. Dokumen Perencanaan Pelabuhan Subelen Kab. Kepulauan Mentawai

Tabel 2.15 Tahapan Perencanaan Pelabuhan Subelen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | TAHUN | DANA |
| 1 | Studi Kelayakan | 2008 | APBD Sumbar |
| 2 | Rencana Induk Pelabuhan | 2009 | APBD Sumbar |
| 3 | Detail Engineering Design | 2012 | APBD Sumbar |
| 4 | DLKr & DLKp Pelabuhan | 2013 | APBD Sumbar |

Guna pengembangan pelabuhan yang sudah ada telah disiapkan dokumen pendukung yaitu Dokumen Perencanaan Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Siberut/Simailepet Kab. Kepulauan Mentawai

Tabel 2.16 Tahapan Perencanaan Pelabuhan Siberut/Simalepet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | TAHUN | DANA |
| 1 | Dokumen Lingkungan DPLH | 2015 | APBD Sumbar |
| 2 | DED Perpanjangan Dermaga | 2015 | APBD Sumbar |
| 3 | DLKr & DLKp Pelabuhan | 2015 | APBN |
| 4 | Dokumen Lingkungan UKL-UPL | 2016 | APBD Sumbar |
| 5 | Rencana Induk Pelabuhan | 2016 | ABPN |

Dan untuk kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bidang Perhubungan Laut selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Kegiatan Perhubungan Laut 2010 - 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | TAHUN | KEGIATAN |
| 1 | 2010 | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis |
| 2 | 2011 | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis |
| 3 | 2012 | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis |
|  |  | Penyuluhan Pengukuran Kapal |
| 4 | 2013 | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis |
|  |  | Sosialisasi PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan |
| 5 | 2014 | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis |
|  |  | Pembinaan tentang keselamatan pelayaran dan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kab/Kota Di Sumbar |
| 6 | 2015 | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis |
|  |  | Pembinaan terhadap perusahan penunjang angkutan laut sesuai PP no. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan |

Kegiatan pengawasan dan monitoring rutin dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan transportasi, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

1. **Pelayanan Sub Sektor Udara.**

Di Sumatera Barat saat ini terdapat 6 buah bandara :

1. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang
2. Bandara Tabing di Padang
3. Bandara Rokot di Sipora kab. Kep. Mentawai
4. Bandara Pusako Anak Nagari di Pasaman Barat
5. Bandara Khusus Tidar Kerinci Agung (TKA) di Kab. Solok Selatan
6. Bandara Piobang di Kab. 50 Kota

Tetapi yang menjadi bagian dari pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat hanya 4 bandara, sementara Bandara Piobang tidak lagi beroperasi dan Bandara TKA digunakan untuk kepentingan perusahaan TKA.

Perkembangan jumlah pesawat terbang yang melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu panjang landasan (Runway) telah diperpanjang dari 2.750 x 45 m menjadi 3.000 x 45 m.

**Tabel 2.18 Jumlah Pesawat Terbang yang melalui BIM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TAHUN** | **DALAM NEGERI** | **LUAR NEGERI** | **JUMLAH** |
| 1 | 2011 | 13.531 | 1.120 | 14.651 |
| 2 | 2012 | 15.125 | 1.661 | 16.786 |
| 3 | 2013 | 17.264 | 1.746 | 19.010 |
| 4 | 2014 | 17.300 | 1.534 | 18.834 |
| 5 | 2015 | 19.402 | 1.511 | 20.913 |
| **JUMLAH** | | 82.622 | 7.572 | 90.194 |

Meningkatnya perkembangan pariwisata di Sumatera Barat berdampak dengan meningkatnya jumlah penumpang pesawat terbang dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.19 Jumlah Penumpang Pesawat Terbang yang melalui BIM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TAHUN** | **DALAM NEGERI** | **LUAR NEGERI** | **JUMLAH** |
| 1 | 2011 | 2.066.636 | 147.217 | 2.213.853 |
| 2 | 2012 | 2.334.596 | 251.675 | 2.586.271 |
| 3 | 2013 | 2.485.420 | 206.840 | 2.692.260 |
| 4 | 2014 | 2.481.573 | 192.627 | 2.674.200 |
| 5 | 2015 | 2.841.498 | 191.818 | 3.033.310 |
| **JUMLAH** | | 12.209.723 | 990.177 | 13.199.894 |

Untuk melihat sejauhmana kinerja Dinas Perhubungan, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan memakai indikator dari Perjanjian Kinerja antara Dinas Perhubungan dengan Kepala Daerah (dapat dilihat pada tabel T.IV.C.2). Dari tabel ini dapat memperlihatkan kinerja SKPD selama jangka waktu pelaksanaan Renstra sebelumnya, yaitu Renstra tahun 2011-2015.

Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan pada program kerja yang berkaitan dengan tugas di bidang perhubungan untuk Tahun 2010 - 2015 cukup berfluktuasi. Pada program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada tahun 2011 terjadi penurunan anggaran, kemudian baru meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas dari tahun 2010 – 2013 peningkatan anggaran cukup signifikan, tetapi menurun pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali pada tahun 2015. Begitu juga untuk program Pengembangan Angkutan Kereta Api dan Pemeliharaan Rehabilitasi dan Peningkatan Transportasi Laut anggarannya cukup berfluktuasi. Program yang penganggarannya naik secara signifikan adalah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara dan Pengembangan. Untuk lebih jelasnya Anggaran dan realisasi program dapat dilihat pada tabel T.IV.C.3 dibawah ini.

**Tabel T.IV.C.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Perjanjian Kinerja** | **Target Renstra SKPD Tahun** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun (%)** | | | | | **Rasio Capaian (%)** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **1** | Porsentase Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Kominfo | **-** | **-** | 100 % | 84,56% | 65,58% | 38,47% | 34,07% | 31,17% | 84,56% | 102,26 | 85,84% | 116,95% | 141,11% | 100% | 84,56% | 102,26 | 85,84% | 116,95% |
| **2** | Porsentase Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dan Jumlah Angkutan Barang yang laik Jalan | **-** | **-** | 100 % | 16 Keg | 3 paket | 18 Keg | 18 Keg | 100% | 82,34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **3** | Jumlah Peningkatan MRL pada perlintasan sebidang jalur Kereta Api dengan Jalan | **-** | **-** | 100 % | 1 pkt | 1,55 pkt | 3 Pkt | 3 Pkt | 3 Pkt | 50% | 77,50% | 75% | 75% | 100% | 50% | 77,50% | 75% | 75% | 100% |
| **4** | Porsentase Keterbukaan Wilayah Terpencil | **-** | **-** | 100 % | 2 trayek/ 4 prov | 2 trayek/ 4 prov | 2 trayek/ 4 prov | 2 trayek/4 prov | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **5** | Jumlah Pelayanan Angkutan Udara Untuk Keselamatan Penerbangan CJH | **-** | **-** | 100 % | 7000 org | 7500 org | 7500 Org | 7000 org | 7000 org | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **6** | Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui :  Media Massa | **-** | **-** | 100 % | 30 berita | 35 berita | 40 berita | 45 berita | 48 berita | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Elektronik | **-** | **-** | 100 % | 4 tv | 4 tv | 4 tv | 4 tv | 4 tv | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Badan politik dan tatap muka | **-** | **-** | 100 % | 300 org | 400 org | 500 org | 700 org | 900 org | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**Tabel T.IV.C.3 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN PROGRAM** | **ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)** | | | | | | **REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)** | | | | | | **RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)** | | | | | | **RATA-RATA PERTUMBUHAN (Rp)** | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 2.735.000.000 | 1.465.600.000 | 2.865.057.112 | 4.375.670.000 | 4.175.000.000 | 5.158.363.710 | 2.561.966.900 | 1.350.346.125 | 2.738.231.100 | 4.131.361.100 | 4.079.314.511 | 5.000.332.218 | 93,6 | 92,1 | 95,5 | 94,4 | 97,7 | 96,9 | 3.594.727.285 | 3.395.355.603 |
| Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas | 195.200.000 | 1.581.000.000 | 1.516.000.000 | 2.483.523.500 | 1.765.000.000 | 2.611.286.750 | 182.417.300 | 1.337.184.450 | 1.332.821.113 | 1.841.052.325 | 1.421.600.550 | 2.110.739.625 | 93,4 | 84,5 | 87,9 | 74,1 | 80,5 | 80,8 | 630.414.458 | 534.207.238 |
| Pengembangan Angkutan Kereta Api | 210.000.000 | 8.876.210.000 | 9.829.000.000 | 16.759.879.099 | 2.900.000.000 | 9.118.056.570 | 190.690.450 | 8.645.578.100 | 9.050.896.000 | 10.149.651.000 | 1.920.575.729 | 8.495.848.478 | 90,8 | 97,4 | 92,0 | 60,5 | 66,2 | 93,1 | 1.729.676.095 | 1.606.665.196 |
| Pemeliharaan Rehabilitasi dan Peningkatan Transportasi Laut | 278.300.000 | 649.500.000 | 959.901.000 | 1.299.981.400 | 715.000.000 | 2.272.747.200 | 183.295.100 | 543.292.750 | 931.703.800 | 1.286.065.700 | 677.718.150 | 2.226.846.750 | 65,8 | 83,6 | 97,0 | 98,9 | 94,7 | 97,9 | 657.091.200 | 554.436.225 |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara | 140.000.000 | 306.000.000 | 350.000.000 | 479.375.000 | 564.000.000 | 453.801.925 | 121.638.950 | 236.781.900 | 230.657.525 | 323.711.975 | 415.029.175 | 334.828.570 | 86,8 | 77,3 | 65,9 | 67,5 | 73,5 | 73,7 | 215.633.654 | 177.443.712 |
| Pengembangan Komunikasi Dan Informatika | 140.000.000 | 130.000.000 | 410.000.000 | 792.938.500 | 1.955.000.000 | 2.875.658.700 | 121.638.950 | 124.114.250 | 249.045.400 | 715.838.125 | 1.855.500.000 | 2.584.900.972 | 86,8 | 95,4 | 60,7 | 90,2 | 94,9 | 89,8 | 619.276.450 | 552.455.779 |

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD**

Tantangan dalam program reformasi di bidang transportasi, terutama dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan reposisi kelembagaan pemerintah di bidang tarnsportasi untuk lebih memperjelas peran dan fungsi pemerintah, perlu lebih ditekankan pada peran regulator, serta penciptaan iklim yang konduksif bagi peranserta swasta dan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien, akuntabel, kompetitif dan profesional.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kedepan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
3. Pengembangan dan reaktivasi jalur kereta api
4. Pengawasan penyelenggaraan transportasi untuk peningkatan
5. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas
6. Membuka akses transportasi di daerah terpencil untuk membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dari tantangan yang ada muncul peluang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Perhubungan, diantaranya :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatnya upaya Pemda dalam menggali potensi daerah yang mendorong peningkatan mobilitas.
3. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan stakeholders dan instansi teknis terkait lainnya.
4. Adanya minat swasta untuk berinvestasi di bidang transportasi

**Bab III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, tentunya menghadapi berbagai permasalahan dan kendala |

Hal ini tentunya berpengaruh kepada sasaran atau target yang ingin dicapai sehingga tidak bisa maksimal, sehingga permasalahan-permasalan ini perlu ditangani secara serius. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya menjadi isu strategis bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, antara lain sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Rendahnya tingkat disiplin pegawai
3. Masih lemahnya pengawasan dan evaluasi untuk kinerja pegawai
4. Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang Perhubungan
5. Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perekeretaapian
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Angkutan jalan mempunyai peranan besar untuk angkutan dalam Provinsi dan dalam kota, baik dengan moda kendaraan angkutan umum maupun moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan di Sumatera Barat pada umumnya cukup baik. Panjang jalan yang ada di Sumatera Barat terbagi atas jalan nasional 1.500 KM dan jalan provinsi 1.500 KM Sebagian besar kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi di Sumatera Barat dalam keadaan baik.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tinggi menghasilkan beberapa dampak atau permasalahan transportasi dan masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini disadari karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang secara otomatis bertambahnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dijalan sehingga juga harus di ikuti dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap tata cara berkendaraan yang baik, pemahaman terhadap peraturan lalu lintas lainnya serta penyediaan fasilitas lalu lintas sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Untuk itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik tersebut perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas /prasarana keselamataan lalu lintas seperti rambu, marka, delineator, guardrail, traffic light, cermin tikungan serta fasilitas lalu lintas lainnya sebagai pedoman, penuntun dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Simpul transportasi angkutan jalan berupa terminal type A dan Type B di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 12 terminal. Sedangkan jumlah mobil bis yang melayani Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah 1.661 unit yang melayani 181 trayek, sedangkan yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah 535 unit.

Pemasalahan lalu lintas angkutan jalan antara lain :

1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
2. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas
3. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
4. Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi serta belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
5. Rendahnya disiplin berlalu lintas.
6. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
7. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
8. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
9. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
10. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
11. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
12. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
13. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Sumatera Barat khususnya Angkutan Penyeberangan juga mempunyai peranan yang cukup penting. Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan dengan pintu gerbang melalui pelabuhan penyeberangan di Bungus Teluk Kabung Padang, sangat mengandalkan angkutan penyeberangan dalam pengangkutan bahan pokok dan bahan material pembangunan. Saat ini ada 4 (empat) lintasan angkutan penyeberangan kedaerah ini yaitu Padang - Sikakap, jarak 104 mil; Padang – Tua Pejat, jarak 90 mil; Padang- Muara Siberut, jarak 82 mil dan Muara Siberut – Sikabaluan, jarak 60 mil; dengan 4 (empat) pelabuhan penyeberangan di Bungus Padang, Sikakap dan Tua Pejat serta Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kapal penyeberangan yang melayani lintasan tersebut sebanyak 2 (dua) unit kapal jenis Ro-ro yaitu KMP. Ambu-Ambu 571 GT dan KMP. Gambolo 560 GT.

Pemasalahan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

1. Masih terbatasnya pelayanan kapal penyeberangan yang melayani antar pulau di kepulauan Mentawai.
2. Pelayanan kapal di Sikabaluan masih menggunakan dermaga pelabuhan laut, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan kapal penyeberangan jenis Ro-ro yang sangat rawan terjadi kecelakaan baik bagi penumpang maupun keamanan kapal.
3. Masih perlunya peningkatan fasilitas keamanan dan standar keelamatan di pelabuhan.
4. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan
5. Masih rendahnya penggunaan kapasitas kapal sehingga masih perlunya subsidi untuk memberikan pelayanan kepada wilayah kepulauan dalam pelayanan angkutan penyeberangan sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
6. Perkeretaapian

Keberadaan jaringan KA di Sumatera Barat merupakan modal utama yang sangat berharga untuk menjadi dasar pengembangan KA sebagai bagian dari sistem transportasi wilayah. Keberadaan aset jalan KA sepanjang 278,461 km, dimana 197,936 km merupakan lintas operasi sedangkan sisanya sepanjang 80,525 km merupakan lintas non operasi mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai tulang punggung angkutan khususnya angkutan barang sebagaimana telah terjadi pada jaman Belanda sampai beberapa dekade yang lalu. Angkutan hasil alam, khususnya pertambangan batubara telah menjadi salah satu aktifitas perdagangan yang juga ditopang oleh keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Utama Internasional di pantai barat Sumatera.

Guna meningkatkan peran kereta api dalam konstelasi sistem transportasi Sumatera Barat (dan juga Pulau Sumatera), dibutuhkan rencana pengembangan yang terencana dan komprehensif untuk mengoptimalkan keberadaan jaringan kereta api yang ada dan pembangunan jalur kereta api baru sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat serta memperkuat posisi Sumatera Barat dalam jaringan Kereta Api Trans Sumatera.

Permasalahan angkutan Kereta Api antara lain :

1. Masih rendahnya peranan KA dalam pelayanan angkutan umum baik orang maupun barang.
2. Banyaknya rel mati atau tidak berfungsi, dan bahkan pada sebagian ruas telah digunakan oleh masyarakat untuk permukiman dan lain sebagainya, sehingga untuk mengembalikan kepada kondisi dan fungsi semula akan membutuhkan proses yang sulit dan cukup panjang.
3. Banyaknya perlintasan sebidang yang tidak resmi yang memiliki dampak resiko kecelakan yang tinggi baik terhadap pemakai jalan raya diperlintasan sebidang maupun keselamatan dan keamanan kereta api serta juga berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan kereta api.
4. Belum terintegrasinya dengan moda angkutan yang lain.
5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Perhubungan Laut memiliki beberapa hambatan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan transportasi laut terhadap masyarakat didaerah terpencil dan terisolir terutama dibagian Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Belum lengkapnya dokumen perencanaan (tukar menukar kawasan hutan lindung pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai)
3. Belum terlaksananya pembangunan fisik pelabuhan atau dermaga yang telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Belum terlaksananya subsidi untuk kapal MV. Mentawai Fast 2 yang melayari rute Padang - Mentawai
5. Pengembangan Bandara perintis di Sumatera Barat (Bandara Rokot & Bandara Pusako Anak Nagari Pasaman Barat)
6. Pembangunan Helypad di lingkup Sumatera Barat
7. Kajian/pembangunan Emergency Landing
8. Masih terjadinya gangguan penerbangan seperti pesawat yang tidak bisa take off, gagal landing, bahkan kehilangan navigasi, menandakan bahwa kondisi pesawat sudah tidak layak terbang

Secara garis besar kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas
2. Belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum
3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetan lalu lintas
4. Rendahnya disiplin berlalu lintas.
5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi
6. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
7. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
8. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
10. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
11. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
12. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari permasalahan yang ada tentunya tugas Dinas Perhubungan ke depan semakin berat. Oleh karena itu penguatan lembaga, peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan untuk bisa mengurangi permasalahan dan meningkatkan pelayanan transportasi.

Tabel T.IV.C.9 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
| Internal | Eksternal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gambaran pelayanan SKPD | Belum optimal | Persentase Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi. | Keterbatasan anggaran | Regulasi dan proses pengadaan barang jasa | Kebutuhan daerah akan sarana prasarana transportasi tidak seimbang dengan kemampuan pendanaan. |
| Kajian terhadap Renstra Kabupaten/Kota | Sudah selaras | Hasil Musrenbangprov. | Prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi di daerah | Tahapan perencanaan di kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota seringkali tidak melengkapi usulan pembangunan sarana prasarana transportasi dengan dokumen pembebasan lahan, DED dan masterplan. |
| Kajian terhadap Renstra K/L | Sudah selaras | Hasil Musrenbangnas | Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait arah pembangunan infrastruktur di pusat. | Prioritas infrastruktur dari K/L | Pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi |
|  |  |  |  |  | Kepadatan lalu lintas yang berisiko menyebabkan kecelakaam lalu lintas |
|  |  |  |  |  | Masih rendahnya SDM yang paham aplikasi teknologi informasi dan sistem manajemen perkotaan |
| Kajian terhadap RTRW dan KLHS | Sudah merujuk kepada RTRW dan KLHS | Dokumen Amdal | Rencana pembangunan pelabuhan, dan pengembangan jalur kereta api (short cut) Padang - Solok | Kebutuhan RTH dalam rencana pembangunan dermaga | Perubahan lingkungan terkait rencana pembangunan pelabuhan dan pengembangan jalur kereta api (short cut) Padang - Solok |

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, maka ditetapkanlah Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016 - 2021, yaitu :

***“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”***



Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Dari misi gubernur yang ditetapkan, untuk tupoksi Perhubungan mendukung kepada Misi yang ke-5, yaitu **Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**Dan untuk Prioritas Pembangunan Daerah, tupoksi bidang Perhubungan mendukung kepada program ke-9 yaitu **Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur.** Untuk mendukung misi dan program yang telah ditetapkan maka perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 akan difokuskan kepada target capaian dari misi dan prioritas pembangunan daerah tersebut.

Dalam penyusunan RPJMD, untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang menjadi prioritas daerah dilakukan dengan strategi :

1. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang ada di masyarakat dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
2. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan masyarakat
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka dibidang pertanian, pariwisata, industri, kelautan dan kemaritiman, serta energi.
4. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
5. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pelaksanaan dan strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk 9 gerakan pembangunan terpadu yaitu :

1. Gerakan Terpadu Pengamalan Nilai-nilai Agama Dan Pelestarian Serta Aplikasi ABS-SBK
2. Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan
3. Gerakan Terpadu Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP)
5. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP)
6. Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil
7. Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisataan
8. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin
9. Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan

Maka untuk gerakan terpadu, Dinas Perhubungan mendukung kepada poin 2 yaitu Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi Pemerintahan. Poin 5 yaitu Gerakan Terpadu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) dan poin 9 yaitu Gerakan Terpadu Sumbar Bersih dan Pembangunan Berkelanjutan.

Sehingga terlihat bahwa Dinas Perhubungan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dapat dilihat pada tabel berkut :

**TABEL.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perhubungan yang                mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tertuang dalam RPJMD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera |
| Misi 5 | : | Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | 1. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi | 1. Mempercepat pembangunan transportasi massal dalam rangka peningkatan daya saing daerah | 1. Pengembangan aksesibilitas pelayanan angkutan umum antar kota dalam propinsi, kawasan aglomerasi perkotaan dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil |
| 1. Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan SDP |
| 1. Membangun konektifitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi | 1. Pengembangan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar |
| 1. Pembangunan infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda |
| 1. Pembangunan fasilitas keselamatan kereta api |
| 1. Menciptakan integrasi antar dan intermoda | 1. Perbaikan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum |
| 1. Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik | 1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis |
| 1. Peningkatan/pengembangan sistem perijinan |
| 1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas | 1. Menciptakan transportasi yang berkeselamatan dalam menyukseskan program pemerintah menuju *Zero Accident* | 1. Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan LLAJ |
| 1. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah *Black Area* dan *Black Spot* |
|  |  | 1. Pemaduserasian program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait |
| 1. Sosialisasi/advokasi keselamatan jalan |
| 1. Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan |

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD

Tabel.T.IV.C.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap                  Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** | | | | |
| No. | Misi dan Program KDH | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Kebutuhan daerah akan sarana prasarana transportasi tidak seimbang dengan kemampuan pendanaan. | Keterbatasan anggaran APBD Provinsi | Adanya dana DAK dan APBN |
|  |  | Kabupaten/Kota seringkali tidak melengkapi usulan pembangunan sarana prasarana transportasi dengan dokumen pembebasan lahan, DED dan masterplan. | Kurangnya perencanaan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi | Adanya keinginan yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di daerah. |
|  |  | Pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi | Penyelesaian tanah ulayat yang sulit, karena menyangkut banyak pihak | Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan jasa transportasi yang optimal |
|  |  | Kepadatan lalu lintas yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas | Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi | Keinginan masyarakat akan pelayanan transportasi umum yang nyaman |
|  |  | Perubahan lingkungan terkait rencana pembangunan pelabuhan dan pengembangan jalur kereta api (short cut) Padang - Solok | Dampak negatif akan rusaknya mangrove dan terumbu karang, dan rusaknya utan lindung | Kebutuhan daerah untuk pembangunan sarana prasarana transportasi untuk meningkatkan daya saing daerah |

* 1. **Telaahan Renstra K/L.**

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

* Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
* Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
* Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*)

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

B. Pelayanan Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance.*
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance;*

C. Kapasitas Transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda.
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia.
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.



Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akanmembawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi.

Terkait sasaran pembangunan infrastruktur transportasi jangka menengah Renstra K/L, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi pelayanan SKPD, diantaranya :

1. Permasalahan pembebasan lahan untuk pengembangan sarana prasarana transportasi, seperti pembebasan lahan untuk terminal, dermaga dan untuk pengembangan jalur kereta api.
2. Kepadatan lalu lintas yang meningkat sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Masih rendahnya jumlah SDM yang paham aplikasi teknologi informasi dan sistem manajemen transportasi perkotaan.

Hal-hal diatas memberi pengaruh pengaruh kepada pelayanan SKPD kepada masyarakat luas.

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup      Strategis**

Keterkaitan antara Renstra dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat dianalisis dari Misi RPJMD dengan tujuan dari Penatan ruang. Untuk Dinas Perhubungan berkaitan dengan RPJMD pada Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan isu rumusan kebijakan penataan ruang provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Dinas Perhubungan adalah pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah

Dari Misi RPJMD Misi yang parallel dengan tujuan penataan ruang dapat dilihat pada pernyataan dibawah ini:

Misi ke 5 Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berkesesuain dengan kebijakan nomor 7 dari RTRW.

Tujuan penataan ruang merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang diinginkan pada masa yang akan datang. Secara keseluruhan, antara misi yang tertuang dalam RPJMD dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW ada keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan secara langsung terutama pada aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi dan bidang lingkungan hidup, sedangkan keterkaitan secara tidak langsung pada sosial budaya.

Program Dinas Perhubungan yang terkait secara langsung dengan RTRW adalah :

**Pembangunan prasarana fasilitas perhubungan**

Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan khususnya untuk pembangunan dermaga akan menyebabkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan pertanian sehingga memerlukan lahan pengganti non produktif untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Pembangunan sarana transportasi laut memberikan dampak ekonomi positif, namun juga dampak negative mengurangi luas lahan pertanian. Kegiatan ini akan berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Program ini perlu disertai dengan pembangunan ruang hijau disekitar dermaga. Dinas Perhubungan berperan aktif dalam pengaturan RTH di sekitar dermaga/pelabuhan yang akan dibuat.

Program ini juga berpengaruh langsung pada efek turunannya berupa, terbentuknya: komunitas urban city, pemukiman, fasilitas layanan publik, area perdagangan dan industry hilir, area pabrikasi, dll. Dampak lebih jauh: pembukaan lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan), aktivitas manusia dan produk industri yang akan menghasilkan limbah. Dinas Prasarana Jalan memastikan bahwa penunjukan lokasi dan pengembangan kawasan sudah termasuk dalam Tata Ruang.

**Telaahan Renstra terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada tabel 3.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan, Dinas Perhubungan termasuk kepada SKPD yang Penting dan mempunyai kegiatan yang berpengaruh kepada lingkungan hidup.

Dan pada tabel 3.4 Analisis Pemangku Kepentingan, Dinas Perhubungan mendapat bobot 4 untuk SKPD yang mempunyai pengaruh besar terhadap RPJMD. Jadi dapat disimpulkan bahwa SKPD yang mendapat bobot besar dinilai memiliki dalam pelaksanaan KLHS RPJMD sehingga KRPnya akan dikaji lebih lanjut dari pelaksanaan KLHS RPJMD.

Dari Pelaksanaan identifikasi isu-isu dengan kelompok kerja didapatkan isu-isu panjang yang terkait dengan kegiatan Dinas Perhubungan antara lain seperti terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4 Daftar isu panjang KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tema** | **Isu-isu Terkait** |
| 1. | Kualitas Udara | 1. Peningkatan kebisingan akibat penambahan frekuensi penebangan |
| 1. Peningkatan kebisingan akibat reaktifasi moda kereta api |
| 2. | Pesisir Laut dan Pantai | 1. Belum adanya regulasi zonasi pesisir laut |
| 3. | Transportasi | 1. Kemacetan yang ditimbulkan oleh kegiatan pasar di ruas jalan nasional dan provinsi |
| 1. Kemacetan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pusat-pusat bangkitan dan tarikan |
| 1. Belum optimalnya pelayanan terminal angkutan umum. |
| 1. Banyaknya terminal bayangan |
| 1. Perlintasan kereta api tanpa palang/rambu-rambu |
| 1. Jalan raya banyak yang rusak karena muatan berlebih |
| 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum |
| 1. Kemacetan di beberapa titik seperti Basko, Simpang Haru dan Padang Luar |

Untuk itu di dalam penyusunan kegiatan di dalam dokumen Renstra perlu adanya kajian yang terkait kepada isu-isu yang ada dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, agar nantinya dapat memberi solusi atau pemecahan masalah dari isu-isu tersebut.

* 1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ditetapkan isu strategis antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana/infrastruktur serta pelayanan transportasi publik.
2. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas
4. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga perlu pengendalian dan pengawasan yang intensif
5. Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan, sehingga perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * 1. **Visi dan Misi SKPD**   Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Bidang Perhubungan yang terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai  disusunlah Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :  **“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”.** |

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi
   1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara lebih khusus sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah.
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif
3. Meningkatkan pelayanan transportasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan
3. [Terpeliharanya Sarana Prasarana Perhubungan Untuk Menunjang Pelayanan Demi Kelancaran Transportasi.](http://eplanning.sumbarprov.go.id/masterskpd/edit-sasaran/396)

Tabel T.IV.C.24 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum | Persentase peningkatan sarana prasarana Perhubungan | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Keterbukaan wilayah terpencil | voyage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif | Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | % | 2,71 | 2,70 | 2,70 | 2,69 | 2,68 | 2,67 |
| Persentase peningkatan MRL pada Perlintasan sebidang jalur kereta api dengan Jalan | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Persentase pelayanan angkutan udara untuk keselamatan penerbangan bagi Calon Jemaah Haji | CJH | 19,34 | 19,67 | 20,00 | 20,33 | 20,66 | 20,66 |
| 3. | Meningkatnya pelayanan transportasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi | Terpeliharanya sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi | Persentase penumpang terangkut transportasi publik   1. Darat 2. Laut 3. Udara 4. SDP 5. KA | % | 0,01  0,05  0,02  0,04  0,13 | 8,55  7,10  4,05  8,16  17,57 | 17,09  9,20  6,09  12,32  22,41 | 25,63  11,30  8,14  16,48  27,25 | 34,17  13,40  10,19  20,64  32,09 | 42,71  15,31  12,23  24,80  40,00 |

* 1. **Strategi dan Kebijakan SKPD**

Untuk mewujudkan rencana pembangunan, disusunlah strategi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan transportasi massal dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
2. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi
3. Menciptakan integrasi antar dan intermoda
4. Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi
5. Menciptakan transportasi yang berkeselamatan dalam menyukseskan program pemerintah menuju Zero Accident.
6. Meningkatkan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik
7. Membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan

Kemudian ditetapkan arah kebijakan untuk sebagai berikut :

1. Pengembangan aksesibilitas pelayanan angkutan umum antar kota dalam propinsi, kawasan aglomerasi perkotaan dan pelayanan angkutan perintis pada daerah-daerah terpencil
2. Pengembangan jaringan dan prasarana pelayanan angkutan SDP
3. Pengembangan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar
4. Pembangunan infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda
5. Pembangunan fasilitas keselamatan kereta api
6. Perbaikan kelembagaan dan standar pelayanan angkutan umum
7. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis
8. Peningkatan/pengembangan sistem perijinan
9. Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan LLAJ
10. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah *Black Area* dan *Black Spot*
11. Pemaduserasian program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait
12. Sosialisasi/advokasi keselamatan jalan
13. Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan
14. Peningkatan kualitas SDM pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya
15. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
16. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
17. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date

Tabel 4.2

Strategi dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi | Terwujudnya Pelayanan Transportasi, yang Handal dan Terpadu | | | |
| Misi | 1. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana prasarana Transportasi yang Berkelanjutan | | | |
|  | 1. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi | | | |
| No. | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| 1. | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya mutu pelayanan jasa transportasi, sarana dan prasarana lalu lintas yang berkeselamatan | Percepatan pembangunan/pengembangan transportasi dalam rangka peningkatan ekonomi dan daya saing daerah | Mengembangkan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi dan kawasan aglomerasi perkotaan |
|  |  |  |  | Mengembangkan pelayanan angkutan perintis darat, laut, udara, dan perkeretaapian. |
|  |  |  |  | Mengembangkan jaringan dan prasarana darat, laut, udara dan perkeretaapian |
|  |  |  | Peningkatan konektifitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi | Mengembangkan aksesibilitas layanan transportasi dalam mendukung pariwisata Sumbar |
|  | Membangun infrastruktur simpul/sistem jaringan transportasi antar dan intermoda |
|  |  |  | Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik | Meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara transportasi |
|  |  |  | Meningkatkan standar pelayanan angkutan umum |
|  |  | Meningkatnya keselamatan transportasi | Peningkatan transportasi yang berkeselamatan dalam menyukseskan program pemerintah menuju *Zero accident* | Meningkatkan fasilitas keselamatan transportasi |
|  |  | Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas |
|  |  |  |  | Memaduserasikan Program peningkatan keselamatan jalan dengan instansi terkait |
|  |  |  |  | Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi keselamatan transportasi |
| 2. | Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Peningkatan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik | Meningkatkan pelayanan dan kualitas SDM |
| Mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi |
| Pembukaan ruang partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan | Membangun sarana dan prasarana pelayanan publik |

**Bab V**

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif**



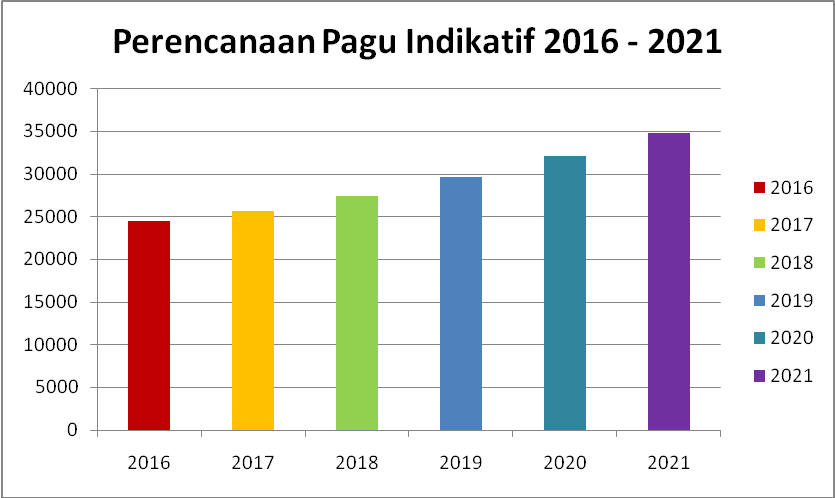
|  |  |
| --- | --- |
|  | Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 dituangkan kedalam 11 Program yang terkait langsung dengan urusan. Yang terdiri dari 6 Program urusan Perhubungan. |

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program,seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini :

**TABEL. T.IV.C.28 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN INDIKATIF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organisasi / SKPD : 1.02.09. DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Lokasi** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode** |
| **Target** | **Rp**  **(000)** | **Target** | **Rp**  **(000)** | **Target** | **Rp**  **(000)** | **Target** | **Rp**  **(000)** | **Target** | **Rp**  **(000)** | **Target** | **Rp**  **(000)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **PERHUBUNGAN** |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.488.000** |  | **21.469.000** |  | **22.990.000** |  |  |  | **26.922.000** |  | **29.148.000** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran SKPD** |  | **20%** | **2.190.000** | **40%** | **2.295.000** | **60%** | **2.457.400** | **80%** | **2.658.800** | **100%** | **2.877.700** | **100%** | **3.115.700** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.001** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Terlaksanannya Jasa Surat menyurat | Padang | 12 bulan | 10.000 | 12 bulan | 12.000 | 12 bulan | 13.400 | 12 bulan | 14.000 | 12 bulan | 16.000 | 12 bulan | 20.700 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.002** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah terbayarnya tagihan Rek. listrik, telp, air dan faximile | Padang | 3 Rekening | 260.000 | 3 Rekening | 350.000 | 3 Rekening | 400.000 | 3 Rekening | 520.000 | 3 Rekening | 550.000 | 3 Rekening | 570.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.003** | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah terbayarnya tagihan pajak rumah dinas | Padang | 1 Rumah jabatan | 35.000 | 1 Rumah jabatan | 40.000 | 1 Rumah jabatan | 44.000 | 1 Rumah jabatan | 48.000 | 1 Rumah jabatan | 46.000 | 1 Rumah jabatan | 50.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.004** | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | Jumlah tersedianya tenaga kebersihan pengamanan dan sopir kantor | Padang | 12 bulan | 700.000 | 12 bulan | 700.000 | 12 bulan | 800.000 | 12 bulan | 1.600.000 | 12 bulan | 900.000 | 12 bulan | 1.000.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.005** | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Ketersediaan ATK Dinas | Padang | 12 bulan | 90.000 | 12 bulan | 95.000 | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 160.000 | 12 bulan | 110.000 | 12 bulan | 115.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.006** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Fotocopy Kantor & Pengadaan | Padang | 12 bulan | 95.000 | 12 bulan | 98.000 | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 115.000 | 12 bulan | 110.000 | 12 bulan | 123.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.007** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah tersedianya Komponen Listrik/ penerangan bangunan kantor Dinas | Padang | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 30.00 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 53.000 | 12 bulan | 42.000 | 12 bulan | 45.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.008** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor | Padang | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 40.000 | 12 bulan | 46.000 | 12 bulan | 50.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.009** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Ketersediaan 2 Media Cetak dan buku bacaan/PERPU | Padang | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 40.000 | 12 bulan | 42.000 | 12 bulan | 45.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.010** | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Ketersediaan Makan Minum untuk Rapat | Padang | 12 bulan | 200.000 | 12 bulan | 200.000 | 12 bulan | 200.000 | 12 bulan | 475.000 | 12 bulan | 42.000 | 12 bulan | 45.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.011** | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Pelaksanaan Rakor & Konsultasi dalam dan luar Daerah | Padang | 12 bulan | 500.000 | 12 bulan | 500.000 | 12 bulan | 500.000 | 12 bulan | 870.000 | 12 bulan | 670.000 | 12 bulan | 720.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.012** | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Jumlah jasa informasi dokumenter dan Publikasi + Camera SKPD | Padang | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 35.000 | 12 bulan | 37.000 | 12 bulan | 40.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.013** | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | Jumlah Pembinaan Ceramah agama & kesegaran jasmani | Padang | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 96.000 | 12 bulan | 26.000 | 12 bulan | 30.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.01.014** | Penataan dan Pengelolaan Arsip | Jumlah Arsip yang tertata dan terkelola / yg autentik | Padang | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 22.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terpenuhinya Peningkatan Sarana & Prasarana** |  | **20%** | **962.400** | **40%** | **1.008.500** | **60%** | **1.079.900** | **80%** | **1.168.400** | **100%** | **1.264.600** | **100%** | **1.369.200** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02.001** | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess | Jumlah terpeliharanya alat perabot rumah tangga jabatan dinas | Padang | 12 bulan | 45.400 | 12 bulan | 50.000 | 12 bulan | 50.000 | 12 bulan | 70.000 | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 100.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.002 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah terpeliharanya Gedung Kantor | Padang | 12 bulan | 85.000 | 12 bulan | 90.000 | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 350.000 | 12 bulan | 350.000 | 12 bulan | 350.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.003 | Rehab gedung Kantor | Terpeliharanya Bangunan Kantor | Padang | 1 Kantor |  |  |  |  |  | 12 bulan | 200.000 | 12 bulan | 200.0000 | 12 bulan | 200.0000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.004 | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya mushalla dan toilet dan tempat parker sepeda motor | Sumbar | 5 Terminal |  |  |  |  |  | 12 bulan | 285.000 | 12 bulan | 300.000 | 12 bulan | 300.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.005 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah terjaminnya mobilitas Kendaraan Operasional | Padang | 12 bulan | 145.000 | 12 bulan | 150.000 | 12 bulan | 155.900 | 12 bulan | 190.000 | 12 bulan | 200.000 | 12 bulan | 200.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.006 | Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur | Jumlah terpeliharanya Mobiler Dinas | Padang | 12 bulan | 10.000 | 12 bulan | 12.000 | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 25.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.007 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | Padang | 12 bulan | 38.000 | 12 bulan | 40.000 | 12 bulan | 45.000 | 12 bulan | 105.000 | 12 bulan | 110.000 | 12 bulan | 110.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.008 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | Jumlah Terpelihara alat instalasi listrik,air,Tlp Kantor | Padang | 12 bulan | 24.000 | 12 bulan | 24.500 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 55.000 | 12 bulan | 60.000 | 12 bulan | 60.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.009 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi | Jumlah terawat dan terpeliharanya Komputer dan Jaringan komputerisasi | Padang | 12 bulan | 10.000 | 12 bulan | 12.000 | 12 bulan | 14.000 | 12 bulan | 6.000 | 12 bulan | 7.500 | 12 bulan | 25.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.010 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Jumlah terawat dan terpeliharanya Komputer dan Jaringan komputerisasi | Padang | 12 bulan | 10.000 | 12 bulan | 10.000 | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 24.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 25.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.011 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah petunjuk ruang atau pejabat yang tersedia | Padang | 12 bulan |  |  |  |  |  | 12 bulan | 8.000 | 12 bulan | 8.000 | 12 bulan | 8.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.012 | Pengadaan Meubeleur | Jumlah meubeleur yang tersedia | Padang |  |  | 3 meja kantor, 3 kursi kerja | 100.000 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 110.000 | 12 bulan | 110.000 | 12 bulan | 110.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.013 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Jumlah terpenuhinya komputer kantor dlm melaksanakan kelancaran tugas | Padang | 12 bulan | 50.000 | 12 bulan | 50.000 | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 130.000 | 12 bulan | 130.000 | 12 bulan | 130.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.014 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah tersedianya Mobil Dinas | Padang | 1 unit | 450.000 | 1 unit | 450.000 | 1 unit | 450.000 | 2 unit | 900.000 | 2 unit | 900.000 | 2 unit | 900.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.015 | Pembangunan garase dan Parkir Mobil | Jumlah tempat parkir sepeda motor | Padang | 1 lapangan | 75.000 |  | - | 1 lapangan | 75.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.016 | Pengadaan Timbangan Portable | Tersedianya perlengkapan operasional Dinas | Sumbar |  | - |  | - | 1 unit | 55.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.02**.017 | Pengadaan Kendaraan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara gabungan | Tersedianya kendaraan operasional pemeriksaan gabungan | Sumbar |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Peningkatan disiplin pegawai** |  | **20%** | **147.000** | **40%** | **154.000** | **60%** | **164.900** | **80%** | **178.500** | **100%** | **193.200** | **100%** | **209.100** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.03.001** | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Terlaksananya pengendalian intern pemrintah pada Instansi Perhubungan | Sumbar |  |  | 1 dokumen | 44.000 | 1 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 55.000 | 1 dokumen | 60.000 | 1 dokumen | 65.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.03**.002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah terpenuhi Pakaian Dinas ( PDH) | Padang | 280 orang | 147.000 | 180 orang | 100.000 | 245 orang | 103.900 | 107 orang | 120.000 | 110 orang | 133.200 | 115 orang | 144.100 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.03**.003 | Pengadaan Mesin Absensi | Tersedianya Fasilitas Mesin Absensi | Padang |  |  | 2 unit | 10.000 | 2 unit | 11.000 | 2 unit | 12.000 | 2 unit | 12.000 | 2 unit | 12.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.04** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan Sumber Daya Aparatur** |  | **20%** | **100.000** | **40%** | **104.800** | **60%** | **112.200** | **80%** | **121.400** | **100%** | **131.400** | **100%** | **142.300** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.04.001** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Sosialisasi, Bimtek, Implementasi Perpu | Padang | 12 bulan | 100.000 | 12 bulan | 104.800 | 12 bulan | 112.200 | 12 bulan | 400.000 | 12 bulan | 400.000 | 12 bulan | 400.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Peningkatan Layanan Program dan Keuangan** |  | **20%** | **415.000** | **40%** | **434.900** | **60%** | **465.700** | **80%** | **503.800** | **100%** | **545.300** | **100%** | **590.400** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.001** | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD | Jumlah Pengelolaan Pengawasan Aset dan pengendalian Aset Daerah | Padang | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 30.000 | 12 bulan | 75.000 | 12 bulan | 75.000 | 12 bulan | 75.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.002** | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Jumlah tersedianya masukan yg lengkap bagi pimpinan daerah utk mengukur capaian kinerja OPD | Padang | 12 bulan | 40.000 | 12 bulan | 41.900 | 12 bulan | 50.700 | 12 bulan | 50.000 | 12 bulan | 50.000 | 12 bulan | 50.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.003** | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD | Jumlah tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran OPD | Padang | 12 bulan | 40.000 | 12 bulan | 15.000 | 12 bulan | 20.000 | 12 bulan | 17.000 | 12 bulan | 17.000 | 12 bulan | 17.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.004** | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD | Jumlah hasil pengawasan dan Lap. Program Kegiatan OPD | Padang | 12 bulan | 75.000 | 12 bulan | 150.000 | 12 bulan | 155.000 | 12 bulan | 180.000 | 12 bulan | 180.000 | 12 bulan | 185.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.005** | Penatausahaan Keuangan OPD | Jumlah tertatanya sistem keuangan OPD | Padang | 12 bulan | 260.000 | 12 bulan | 228.000 | 12 bulan | 240.000 | 12 bulan | 255.000 | 12 bulan | 270.000 | 12 bulan | 285.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.006** | Buku statistik perhubungan | Tersedianya 1 dokumen | Sumbar | 100 buku |  |  |  |  |  | 100 buku | 75.000 | 100 buku | 75.000 | 100 buku | 75.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.05.007** | Pemantauan angkutan lebaran | Terpantaunya angkutan lebaran di Sumbar | Sumbar | 19 KabKota |  |  |  |  |  | 19 KabKota | 100.000 | 19 KabKota | 100.000 | 19 KabKota | 100.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.06** | **Program Pelayanan Kedinasan** | **Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran SKPD** |  | **20%** | **2.190.000** | **40%** | **2.295.000** | **60%** | **2.457.400** | **80%** | **2.658.800** | **100%** | **2.877.700** | **100%** | **3.115.700** |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.06.001** | Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | Jumlah Terdukungnya upacara-upacara dengan Ops. Korsik | Padang | 12 bulan | 150.000 | 12 bulan | 150.000 | 12 bulan | 150.000 | 12 bulan | 290.000 | 12 bulan | 290.000 | 12 bulan | 290.000 |  |
|  |  | Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum | Peningkatan keterbukaan wilayah terpencil | **1.02.102.09.01.07** | **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Pelayaran** | **Terklasananya pengawasan terhadap angkutan laut peritis** | **Sumbar** | **20%** | **480.000** | **40%** | **503.000** | **60%** | **538.600** | **80%** | **582,700** | **100%** | **630.700** | **100%** | **682.900** | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07001** | Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis | Jumlah trayek yang diawasi melayani angkutan kapal perintis | Padang, Kab.Pessel, Mentawai | 2 Trayek | 46.950 | 1 Laporann | 77.000 | 1 Laporann | 80.000 | 1 Laporann | 120.000 | 1 Laporann | 120.000 | 1 Laporann | 120.000 | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07002** | Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kab/Kota se Sumbar | Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Kespel | Sumbar | 6 Kab/Kota | 20.000 | 6 Kab/Kota | 35.000 | 6 Kab/Kota | 40.000 | 6 Kab/Kota | 92.000 | 6 Kab/Kota | 92.000 | 6 Kab/Kota | 92.000 | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07003** | Pengawasan dan Pembinaan Pelabuhan di Prov. Sumbar | Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan Pelabuhan | Sumbar | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 1 Laporan | 70.000 | 1 Laporan | 70.000 | 1 Laporan | 70.000 |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07004** | Penyusunan Dokumen DED Pengembangan Pelabuhan Tua Pejat | Terlaksananya Penyusunan Dokumen DED Pelabuhan Tua Pejat |  | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 800.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07005** | Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pengembangan Pelabuhan Tua Pejat | Terlaksananya Penyusunan Dokumen lingkungan Pelabuhan Tua Pejat |  | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 300.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07006** | Pengawasan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis di Sumbar | Terlaksananya pengawasan terhadap Pelayaran Penyeberangan Perintis di Sumbar |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 1 Laporan | 75.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.07007** | Evaluasi Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar | Terlaskananya Pendataan Angkutan Sarana Prasarana Terhadap Sungai dan Danau |  | 1 Laporan |  |  |  |  |  | 1 Laporan | 64.500 |  |  |  |  |  |
| **Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi** | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas | **1.02.102.09.01.08** | **Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas** | **Persentase Sarana Keselamatan Lalulintas Jalan** |  | **20%** | **210.000** | **40%** | **220.000** | **60%** | **235.600** | **80%** | **255.000** | **100%** | **275.900** | **100%** | **298.800** | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.08.001**. | Pengadaan dan Pemasangan (rambu, marka, guardrail, deliniator, cermin tikungan, traffic light dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan | Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Sumatera Barat | Sumbar | 100% | 2.509.623 | 13,16 % | 2.500.000 | 18,42 % | 3.500.000 | 21,05 % | 4.000.000 | 23,68 % | 4.500.000 | 23,68 % | 4.500.000 | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.08.002**. | Pengadaan dan Pemasangan Prasarana lalu lintas Pendukung Tour de Singkarak | Tersedianya fasilitas pendukung untuk kelancaran penyelenggaran Tour De Singkarak | Sumbar | 100% | 400.000 | 1 paket | 400.000 | 1 paket | 400.000 | 1 paket | 500.000 | 1 paket | 500.000 | 1 paket | 500.000 | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.08.003** | Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis | Terlaksananya monitoring dan pembinaan penyelenggaraan angkutan printis | Sumbar | 1 laporan | 60.000 | 1 laporan | 60.000 | 1 laporan | 60.000 | 1 laporan | 80.000 | 1 laporan | 80.000 | 1 laporan | 80.000 | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.08.004** | Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat | Jumlah Tersedianya RPPJ di Sumbar | Sumbar | 8 buah | 100.000 | 8 buah | 100.000 | 10 buah | 120.000 | 14 buah | 175.000 | 14 buah | 175.000 | 14 buah | 175.000 | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.08.005** | Evaluasi Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar | Terlaskananya Pendataan Angkutan Sarana Prasarana Terhadap Sungai dan Danau | Sumbar | 1 Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.08.005** | Penilaian ANDALALIN di jalan provinsi Sumbar | Jumlah ANDALALIN yang dinilai | Sumbar | 1 paket |  |  |  |  |  |  | 25.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan | 25.000 | 12 bulan |
| **Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Perhubungan.** | **Meningkatkan kualitas prasarana transportasi** | **Terpeliharanya sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi.** | **Persentase peningkatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ** | **1.02.102.09.01.09.** | **Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ** | **Persentase Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Darat** |  | **20%** | **359.039** | **40%** | **4.449.100** | **60%** | **4.764.300** | **80%** | **5.154.800** | **100%** | **5.579.000** | **100%** | **6.040.500** | **100%** |
|  |  |  |  | **1.02.102.09.01.09.01** | Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe B di Sumbar | Terciptanya Jasa Operasional Terminal Tipe B di Sumbar | Sumbar |  |  |  |  |  |  |  | 1.217.500 | 5 terminal | 1.217.500 | 5 terminal | 1.217.500 | 5 terminal |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.29.01. | Pengadaan dan Pemasangan ( rambu, rarka, guardrail,deliniator,cermin tikungan,traffic light dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan | Porsentase Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Sumatera Barat | Sumbar | 100% | 2.509.623 | 13,16 % | 2.500.000 | 18,42 % | 3.500.000 | 21,05 % | 400.000 | 23,68 % | 4.500.000 | 23,68 % | 4.500.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meningkatkan pembangunan sarana prasarana Transportasi yang Berkelanjutan** | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan | **Persentase peningkatan sarana prasarana perhubungan** | **1.07.1.07.01.29.** | **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **Persentase Pembangunan prasarana dan fasilitas Transportasi Darat dan Laut** |  | **20%** | **7.386.850** | **40%** | **7.740.000** | **60%** | **8.288.700** | **80%** | **8.968.100** | **100%** | **9.706.400** | **100%** | **10.509.000** | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.29.02. | Pemeliharaan/perawatan (Rambu,marka guardrail,deliniator dan traffic light) sarana perlengkapan jalan | Porsentase Meningkatnya fungsi perlengkapan jalan | Sumbar | 100% | 300.000 | 4 paket | 300.000 | 4 paket | 330.000 | 4 paket | 363.000 | 4 paket | 400.000 | 4 paket | 400.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.29.03. | Pengadaan dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour de Singkarak | Porsentase Tersedianya fasilitas pendukung untuk kelancaran penyelenggaran Tour De Singkarak | Sumbar | 100% | 400.000 | 1 paket | 400.000 | 1 paket | 400.000 | 1 paket | 450.000 | 1 paket | 450.000 | 1 paket | 450.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.29.04. | Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan DAK Sub Sektor Perhubungan Darat pada Kab/Kota | Jumlah hasil monitoring dan pembinaan pelaksanaan DAK | Sumbar | 1 laporan | 60.000 | 1 laporan | 460.000 | 1 laporan | 466.000 | 1 laporan | 472.000 | 1 laporan | 579.800 | 1 laporan | 588.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.29.05. | Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat | Jumlah Tersedianya RPPJ di Sumbar | Sumbar | 8 buah | 100.000 | 8 buah | 100.000 | 10 buah | 120.000 | 10 buah | 125.000 | 10 buah | 125.000 | 10 buah | 130.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.29. .. | Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Dan Fasilitas Transportasi Perkotaan | Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan Dan Fasilitas Transportasi Perkotaan | Sumbar | 100% | 4.017.227 | 3 paket | - | 3 paket | - | 3 paket | - | 3 paket | - | 3 paket | - | **100%** |
|  | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Jumlah Peningkatan MRL pada Perlintasan sebidang jalur kereta api dengan Jalan | **1.07.1.07.01.37.** | **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian** | **Jumlah MRL pada Perlintasan Sebidang Jalan KA dengan Jalan** |  | **20%** | **5.300.000** | **40%** | **1.480.800** | **60%** | **1.585.700** | **80%** | **1.715.700** | **100%** | **1.856.900** | **100%** | **2.010.500** | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.37.01. | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan sebidang jalan Kereta Api pada ruas jalan di Sumatera Barat | Jumlah paket MRL pada perlintasan sebidang yang terpasang | Perlintasan Sebidang di Sumbar | 3 paket | 200.000 | 1 Paket | 500.000 | 1 Paket | 750.000 | 1 Paket | 750.000 | 1 Paket | 800.000 | 1 Paket | 1.000.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.37.02. | Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Kereta Api Duku-BIM | Jumlah pjg Ketersediaan Lahan untuk jalur KA Bandara | Sumbar | 4.2 km | 5.000.000 | 4,2 Km | 350.000 | 4,2 Km | 350.000 |  |  |  |  |  |  | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.37.03. | Sosialisasi Keselamatan Kereta Api | Jumlah peserta yg melaksanakan Sosialisasi | Sumbar | 50 org | 100.000 | 1 Paket | 200.000 | 1 Paket | 200.000 | 1 Paket | 250.000 | 1 Paket | 250.000 | 1 Paket | 300.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi/Dukungan Pengembangan/ Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api Sumatera Barat | Jumlah kegiatan Fasilitasi/Dukungan Pengembangan/ Pembangunan Sarana Prasarana KA |  |  | - |  | 430.800 | 1 paket | 285.700 | 1 paket | 715.700 | 1 paket | 806.900 | 1 paket | 710.500 | **100%** |
|  |  | Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum | Peningkatan keterbukaan wilayah terpencil | **1.07.1.07.01.31.** | **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Pelayaran** | **Prosentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut** |  | **20%** | **480.000** | **40%** | **503.000** | **60%** | **538.600** | **80%** | **582,700** | **100%** | **630.700** | **100%** | **682.900** | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.31.01. | Penyusunan UKL-UPL Pengembangan Pelabuhan | Jumlah Tersusunnya Dokumen UKL-UPL Kab. Kep. Pengembangan Pelabuhan | Kab. Kep. Mentawai | 1 Dokumen | 250.000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.31.03. | Penyusunan Data Base Angkutan Laut | Jumlah Tersusunnya Data Base Angkutan Laut | Padang | 1 Paket | 103.050 | 1 Paket | 43.000 |  | - |  | - |  | - |  | - | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.31.05. | Pelatihan SAR dalam rangka siap siaga bencana | Jumlah adanya tenaga profesional penanggulangan bencana | Padang | 30 Orang | 55.000 |  | - | 30 Orang | 75.000 |  |  | 30 Orang | 75.000 |  |  | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.31.06. | Pembinaan tentang Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kab/Kota se Sumbar | Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Kespel | Sumbar | 6 Kab/Kota | 20.000 | 6 Kab/Kota | 35.000 | 6 Kab/Kota | 40.000 | 6 Kab/Kota | 45.000 | 6 Kab/Kota | 50.000 | 6 Kab/Kota | 55.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.31.07. | Pemeliharaan Peralatan SAR | Prosentase terpeliharanya peralatan SAR  Dishubkominfo Sumbar | Padang | 100% | 5.000 |  | - | 100% | 15.000 | 100% | 20.000 | 100% | 25.000 | 100% | 25.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Subsidi Kapal Penumpang Trayek Padang - Mentawai | Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut | Padang dan Kab. Kep. Mentawai |  | - | 1 Tahun | 3.525.000 | 1 Tahun | 4.000.000 | 1 Tahun | 4.500.000 | 1 Tahun | 5.000.000 | 1 Tahun | 5.000.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Sistim Informasi Data Base Angkutan Laut | Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana | Padang |  | - | 1 Paket | 43.000 | 1 Paket | 50.000 | 1 Paket | 55.000 | 1 Paket | 60.000 | 1 Paket | 60.000 | **100%** |
| **Meningkatkan Pelayanan Transportasi, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi** | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum | Persentase meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor. | **1.07.1.07.01.33.** | **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan** | **Persentase terpenuhinya Frekuensi Pelayanan Angkutan/Transportasi (Darat, Laut dan Udara)** |  | **20%** | **2.938.100** | **40%** | **3.078.700** | **60%** | **3.296.900** | **80%** | **3.567.100** | **100%** | **3.860.700** | **100%** | **4.180.000** | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.01. | Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan | Jumlah Tersusunnya data base Angkutan Jalan | Padang | 1 Dokumen | 175.000 | 1 Dokumen | 200.000 |  | - |  | 250.000 | 1 dokumen | 250.000 | 1 dokumen | 250.000 | 1 dokumen |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.02. | Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) | Jumlah rawatan alat Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) | Padang | 1 paket | 40.000 | 1 Paket | 40.000 | 1 Paket | 50.000 | 1 Paket | 60.000 | 1 Paket | 66.000 | 1 Paket | 73.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.03. | Penghargaan Wahana Tata Nugraha | Jumlah Terpilihnya kota-kota penerima penghargaan wahana tata nugraha | Sumbar | 13 Kab/Kota | 200.000 | 13 Kab/Kota | 200.000 | 14 Kab/Kota | 220.000 | 14 Kab/Kota | 230.000 | 14 Kab/Kota | 240.000 | 14 Kab/Kota | 250.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.04. | Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum | Jumlah peserta Terwujudnya disiplin berlalu lintas di jalan | Padang | 40 org pengemudi Ka/kota | 82.826 | 54 org pengemudi Ka/kota | 175.000 | 54 org pengemudi Ka/kota | 200.000 | 54 org pengemudi Ka/kota | 150.000 | 50 org pengemudi Ka/kota | 250.000 | 50 org pengemudi Ka/kota | 275.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.05 | Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Type B | Jumlah Hasil Monitoring / Pembinaan Terminal Type B | Sumbar |  | - | 8 Kab/Kota | 100.000 | 8 Kab/Kota | 110.000 | 8 Kab/Kota | 250.000 | 8 Kab/Kota | 130.000 | 8 Kab/Kota | 140.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Bantuan Kerjasama peningkatan fasilitas angkutan umum missal di kota padang | Terbangunnya halte untuk angkutan umum | padang | 1 pkt | - | - | - | - | - | - | 225.000 | 3 halte | 225.000 | 3 halte | 225.000 | 3 halte |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.18. | Optimalisasi pemakaian kendaraan derek | Jumlah terbantunya kasus kecelakaan utk mendukung kelancaran lalu lintas mendukung Kelancaran arus lalu lintas | Sumbar | 24 kali | 50.000 | 50 kali | 120.000 | 50 kali | 135.000 | 50 kali | 150.000 | 50 kali | 175.000 | 50 kali | 200.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pembinaan/pemilihan Unit Penguji Kendaraan Bermotor Teladan | Jumlah terbinanya unit PKB terbaik/teladan | Padang dan Jakarta |  |  | 18 kab/kota se- Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas | 75.000 | 18 kab/kota se- Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas | 100.000 | 18 kab/kota se- Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas | 125.000 | 18 kab/kota se- Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas | 135.000 | 18 kab/kota se- Sumatera Barat dan 1 unit PKB ke tk Nas | 150.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.10. | Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor | Jumlah Terbina dan terawasinya bengkel karoseri industri kendaraan bermotor | Padang dan Jakarta | 25 orang pengusaha bengkel karoseri | 40.000 | 25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri | 50.000 | 25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri | 60.000 | 25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri | 70.000 | 25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri | 80.000 | 25 Orang Pengusaha Bengkel Karoseri | 100.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.11. | Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi teknis penguji | Padang dan Jakarta | 50 orang  penguji | 50.000 | 1 X Rapat (50 Orang Penguji se Sumbar ) 2 x tk Nas | 60.000 | 1 X Rapat (50 Orang Penguji se Sumbar ) 2 x tk Nas | 70.000 | 1 X Rapat (50 Orang Penguji se Sumbar ) 2 x tk Nas | 80.000 | 1 X Rapat (50 Orang Penguji se Sumbar ) 2 x tk Nas | 90.000 | 1 X Rapat (50 Orang Penguji se Sumbar ) 2 x tk Nas | 100.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.17. | Investigasi kecelakaan dan investigasi daerah rawan longsor dan bencana alam | Jumlah titik Terupdatenya daerah rawan kecelakaan lalu lintas, longsor dan bencana alam | Sumbar | Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional | 30.000 | Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional | 65.000 | Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional | 85.000 | Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional | 100.000 | Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional | 1.000.000 | Sesuai Titik kejadian Ruas jalan Prov./Nasional | 120.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum | Tercapainya Kenyamanan dan Keselamatan di Jalan | Terminal Type B / Jalan kab/kota se sumbar |  |  | 5 lokasi terminal tipe B | 100.000 | 5 lokasi terminal tipe B | 125.000 | 5 lokasi terminal tipe B | 135.000 | 5 lokasi terminal tipe B | 145.000 | 5 lokasi terminal tipe B | 150.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Penyuluhan/ Sosialisasi Keselamtan Lalin dan Angkutan | Jumlah titik terupdatenya daerah rawan kecelakaan lalu lintas, longsor dan bencana alam | Sumbar |  |  |  |  |  |  | 40 orang peserta | 183.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum | Jumlah Peserta Pengusaha Angkutan Umum yang terbina | Sumbar |  | - |  | - | 50 orang | 225.000 | 50 orang | 225.000 | 50 orang | 225.000 |  | - | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.04. | Sosialisasi Penertiban Berat Muatan dan Dimensi Angkutan Barang | Jumlah menurunnya pelanggaran dimensi dan lebih muatan oleh kendaraan angkutan barang | Padang | 50 orang | 35.0000 | 50 orang | 60.000 | 50 orang | 65.000 | 50 orang | 70.000 | 50 orang | 75.000 | 50 orang | 80.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.05. | Pemilihan Abdi Yasa Teladan | Jumlah Terbinanya awak kendararn umum | Padang | 36 pengemudi  angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional | 150.000 | 36 pengemudi  angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional | 200.000 | 36 pengemudi  angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional | 225.000 | 36 pengemudi  angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional | 250.000 | 36 pengemudi  angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional | 250.000 | 36 pengemudi  angkutan orang/barang 2 orang ke TK. Nasional | 250.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.09. | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas yang peduli terhadap keselamatan lalu lintas angkutan jalan | Padang dan Jakarta | 30 pelajarSLTA, 2 orangke Tk Nasional | 120.000 | 30 pelajarSLTA, 2 orangke Tk Nasional | 175.000 | 30 pelajarSLTA, 2 orangke Tk Nasional | 200.000 | 30 pelajarSLTA, 2 orangke Tk Nasional | 225.000 | 30 pelajarSLTA, 2 orangke Tk Nasional | 235.000 | 30 pelajarSLTA, 2 orangke Tk Nasional | 250.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Billboard Keselamatan | Terpeliharanya Billboard Keselamatan | Ruas Jalan Prov/Nasional |  |  | 3 paket | 100.000 | 3 paket | 110.000 | 3 paket | 125.000 | 3 paket | 135.000 | 3 paket | 150.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Audit Keselamatan Jalan | Menurunnya Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas | Ruas Jalan Prov/Nasional |  |  | 5 Titik | 250.000 | 5 Titik | 350.000 | 5 Titik | 375.000 | 5 Titik | 400.000 | 5 Titik | 425.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Evauasi dan monitoring rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca | Penyusunan dokumne rencana aksi penurunan gas rumah kaca sector perhubungan | Sumbar | 1 Dokumen |  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 137.500 | 1 Dokumen | 137.500 | 1 Dokumen | 137.500 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.02. | Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi Terkait | Jumlah titik pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan instansi terkait | Sumbar | 6 Titik Rauas Jalan Prov./Nasional | 700.280 | 9 Titik Ruas Jalan Prov./Nasional | 1.200.000 | 10 Titik Ruas Jalan Prov./Nasional | 1.300.000 | 10 Titik Ruas Jalan Prov./Nasional | 1.350.000 | 10 Titik Ruas Jalan Prov./Nasional | 1.400.000 | 10 Titik Ruas Jalan Prov./Nasional | 1.450.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.12. | Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum Prov.Sumbar | Jumlah pelaksanaan forum komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu lintas angkutan jalan Prov. Sumbar | Padang dan Jakarta | 60 orang / 4xkegiatan | 52.775 | 60 orang / 4xkegiatan | 76.000 | 60 orang / 4xkegiatan | 85.000 | 60 orang / 4xkegiatan | 100.000 | 60 orang / 4xkegiatan | 110.000 | 60 orang / 4xkegiatan | 120.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.13. | Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jumlah pelaksanaan forum lalu lintas angkutan jalan di Prov. Sumbar | Sumbar | 100 orang / 6x kegiatan | 83.568 | 100 orang / 6x kegiatan | 143.000 | 100 orang / 6x kegiatan | 150.000 | 100 orang / 6x kegiatan | 165.000 | 100 orang / 6x kegiatan | 175.000 | 100 orang / 6x kegiatan | 185.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.14. | Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Terminal tipe A dan B / di jalan | Jumlah terlaksananya pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang umum di terminal tipe A dan B / jalan | Sumbar | 3 terminal / 2x kegiatan | 200.000 | 12 terminal / 2x kegiatan | 900.000 | 12 terminal / 2x kegiatan | 1.000.000 | 12 terminal / 2x kegiatan | 1.100.000 | 12 terminal / 2x kegiatan | 1.200.000 | 12 terminal / 2x kegiatan | 1.300.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.33.16. | Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di jalan (STPJ) | Jumlah Terlasananya tugas-tugas operasional STPJ Prov Sumbar | Sumbar | 30 org petugas khusus pengamanan jalan | 100.000 | 40 org petugas khusus pengamanan jalan | 150.000 | 50 org petugas khusus pengamanan jalan | 200.000 | 50 org petugas khusus pengamanan jalan | 220.000 | 50 org petugas khusus pengamanan jalan | 240.000 | 50 org petugas khusus pengamanan jalan | 260.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Sosialisasi keselamatan transportasi untuk para calon jemaah hajji | Terlaksananya keselamatan para calon jemaah haji | Sumbar |  |  |  |  |  |  | 5000 CHJ | 200.000 |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan wilayah | Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan | Jumlah Peningkatan MRL pada Perlintasan sebidang jalur kereta api dengan Jalan | **1.07.1.07.01.37.** | **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian** | **Jumlah MRL pada Perlintasan Sebidang Jalan KA dengan Jalan** |  | **20%** | **5.300.000** | **40%** | **1.480.800** | **60%** | **1.585.700** | **80%** | **1.715.700** | **100%** | **1.856.900** | **100%** | **2.010.500** | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.37.01. | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan sebidang jalan Kereta Api pada ruas jalan di Sumatera Barat | Jumlah paket MRL pada perlintasan sebidang yang terpasang | Perlintasan Sebidang di Sumbar | 3 paket | 200.000 | 1 Paket | 500.000 | 1 Paket | 750.000 | 1 Paket | 1.300.000 | 1 Paket | 800.000 | 1 Paket | 1.000.000 | **100%** |
|  |  |  |  | 1.07.1.07.01.37.03. | Sosialisasi Keselamatan Kereta Api | Jumlah peserta yg melaksanakan Sosialisasi | Sumbar | 50 org | 100.000 | 1 Paket | 200.000 | 1 Paket | 200.000 | 1 Paket | 200.000 | 1 Paket | 200.000 | 1 Paket | 200.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi/Dukungan Pengembangan/ Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api Sumatera Barat | Jumlah kegiatan Fasilitasi/Dukungan Pengembangan/ Pembangunan Sarana Prasarana KA | Sumbar |  | - |  | 430.800 | 1 paket | 285.700 | 1 paket | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 1 paket | 200.000 | **100%** |
|  |  |  |  |  | Pengumpulan dan analisis data angkutan kereta api di Sumbar | Terlaksananya pengupumpulan data dan analisis angkutan kereta api di Sumbar | Sumbar |  |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 50.000 |  |
|  |  |  |  |  | Investigasi kecelakaan keretaapi dan inventarisasi keselamtan kereta api | Terlaksannya investigasi kecelakaan KA dan terdeteksinya lintasan rawan kecelakaan KA di SUmbar | Sumbar |  |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 75.000 | 1 dokumen | 75.000 | 1 dokumen | 75.000 |  |
|  |  |  |  |  | Monitoring pelayanan angkutan kereta api perintis di sumbar | Terlaksananya monitoring dan pembinaan penyelenggaraan angkutan kereta api perintis | Sumbar |  |  |  |  |  |  | 1 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 50.000 | 1 dokumen | 50.000 |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi/ koordinasi tim terpadu percepatan pembangunan KA di Sumbar | Jumlah fasilitas dan Koordinasi | Sumbar |  |  |  |  |  |  | 1 Paket | 150.000 | 1 Paket | 150.000 | 1 Paket | 150.000 |  |
|  |  |  |  |  | Pembungunan pembatas jalan dengan jalur KA untuk peningkatan keselamatan KA | Tersedianya pembatas jalan dengan jalur KA pada rawan Kecelakaan | sumbar |  |  |  |  |  |  | 1000 m | 1.200.000 | 1000 m | 1.200.000 | 1000 m | 1.200.000 |  |

Dari tabel T.IV.C.28 terlihat perkiraan pagu indikatif Dinas Perhubungan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dengan asumsi kenaikan kebutuhan pembiayaan dan fluktuasi harga BBM, harga barang dan komoditi setiap tahunnya. Perkiraan kenaikkan cukup sgnifikan, yaitu sekitar 5 % setiap tahunnya.



**BAB VI**

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dari 10 Prioritas Pembangunan Daerah 2016 – 2021, yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah prioritas ke 9 yaitu **Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur** |

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai prioritas, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja seperti Tabel di bawah ini:

**TABEL. T.IV.C.29 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD**  **(2015)** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode**  **(2021)** |
| **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **1** | ***Penumpang terangkut transportasi publik (org/Th)***   * ***Darat*** * ***Laut*** * ***Udara*** * ***SDP*** * ***KA*** | 7,11  2,50  2,04  4,10  6,66 | 0,01  0,05  0,02  0,04  0,13 | 8,55  7,10  4,05  8,16  17,57 | 17,09  9,20  6,09  12,32  22,41 | 25,63  11,30  8,14  16,48  27,25 | 34,17  13,40  10,19  20,64  32,09 | 42,71  15,31  12,23  24,80  40,00 |
| **2** | ***Rasio Angka Kecelakaan*** | 2,70 | 2,71 | 2,70 | 2,70 | 2,69 | 2,68 | 2,67 |

**BAB VII**

**Penutup**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah untuk rentang waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan khususnya di sektor transportasi, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2021.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
4. Unit Kerja lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENSTRA ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat.